

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) TAHUN 2018



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2018**

Pengantar

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai salah satu perwujudan atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan .

Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, harus bertolak dan bermuara pada tujuan EKPD yakni menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2004.

Melihat urgensi dari pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan pembangunan di daerah, Pasal 27 (2) UU nomor 32 tahun 2004 memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sebuah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), yang merupakan hasil evaluasi mandiri Pemda (self-assessment) terhadap berbagai dimensi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. LPPD ini kemudian akan dievaluasi lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat dalam proses Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPD) yang dilaksanakan setiap tahunnya. Hasil evaluasi kemudian akan dikembalikan kepada masing – masing Pemda sebagai masukan dalam proses perencanaan, penganggaran hingga pengembangan kapasitas kebijakan, kelembagaan dan aparatur Pemerintah Daerah.

Diharapkan apa yang telah dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan. Disisi lain, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama tahun 2017 agar dapat melaksanakan kinerja

ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, secara rinci hasil *evaluasi capaian kinerja fisik* terhadap 16 (enam belas) program dinas, diketahui bahwa terdapat 15 (lima belas) program hasil evaluasi capaian kinerja sangat baik dan 1 (satu) program yang berkinerja baik.

Dari hasil *evaluasi capaian kinerja keuangan* terhadap 16 (enam belas) program diatas, diketahui bahwa terdapat 13 (tiga belas) program yang berkinerja sangat baik , 1 (satu) program yang berkinerja baik , 1 (satu) program yang berkinerja cukup dan 1 (satu) program yang berkinerja kurang.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2018 terdapat 16 (enam belas) program terdiri dari 11 (sebelas) program strategis dan 5 program pendukung. *Out put* dan *out come* dari program-program strategis tersebut mempunyai korelasi / keterkaitan langsung dengan indikator kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Diharapkan apa yang telah dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disisi lain, LPPD ini dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama tahun 2018 agar

dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Padang, Januari 2019
Kepala Dinas

Ir. Fathol Bari, M.Sc.Eng
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640515 199003 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
----------------------	---

Daftar Isi	ii
------------------	----

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Organisasi	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3. Sumber Daya Manusia Organisasi	5
1.4. Aspek Strategis Organisasi	7
1.5. Isu Strategis	9
1.6. Dasar Hukum	10

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro	12
2.2 Kebijakan Keuangan	12
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	13

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	29
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan	49

BAB IV. TUGAS PEMBANTUAN (APBN)

4.1. Tujuan dan Sasaran	62
4.2. Tugas dan Fungsi.....	63
4.3. Capaian Kinerja Organisasi.....	64

BAB V. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah berupaya mewujudkan tujuan nasional dan daerah. Dalam tataran nasional, pemerintah memiliki visi yaitu terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sementara sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat, pemerintah memiliki visi yaitu Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau yang selanjutnya disingkat dengan Dinas PU dan Penataan Ruang dibentuk pada berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas PU dan Penataan Ruang sendiri memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pencapaian kinerja Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016. Laporan ini memuat analisis kinerja dan keuangan program kerja perangkat daerah pada Dinas PU dan Penataan Ruang yang dilaksanakan selama tahun 2018 sebanyak 16 program , 116 kegiatan dan 202 paket .

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 Dinas PU dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintah daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas PU dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Pembinaan dan fasilitasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lingkup provinsi dan kabupaten/kota
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keciaptakaryaan, Pelaksanaan Jalan serta Bidang Penataan Ruang; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

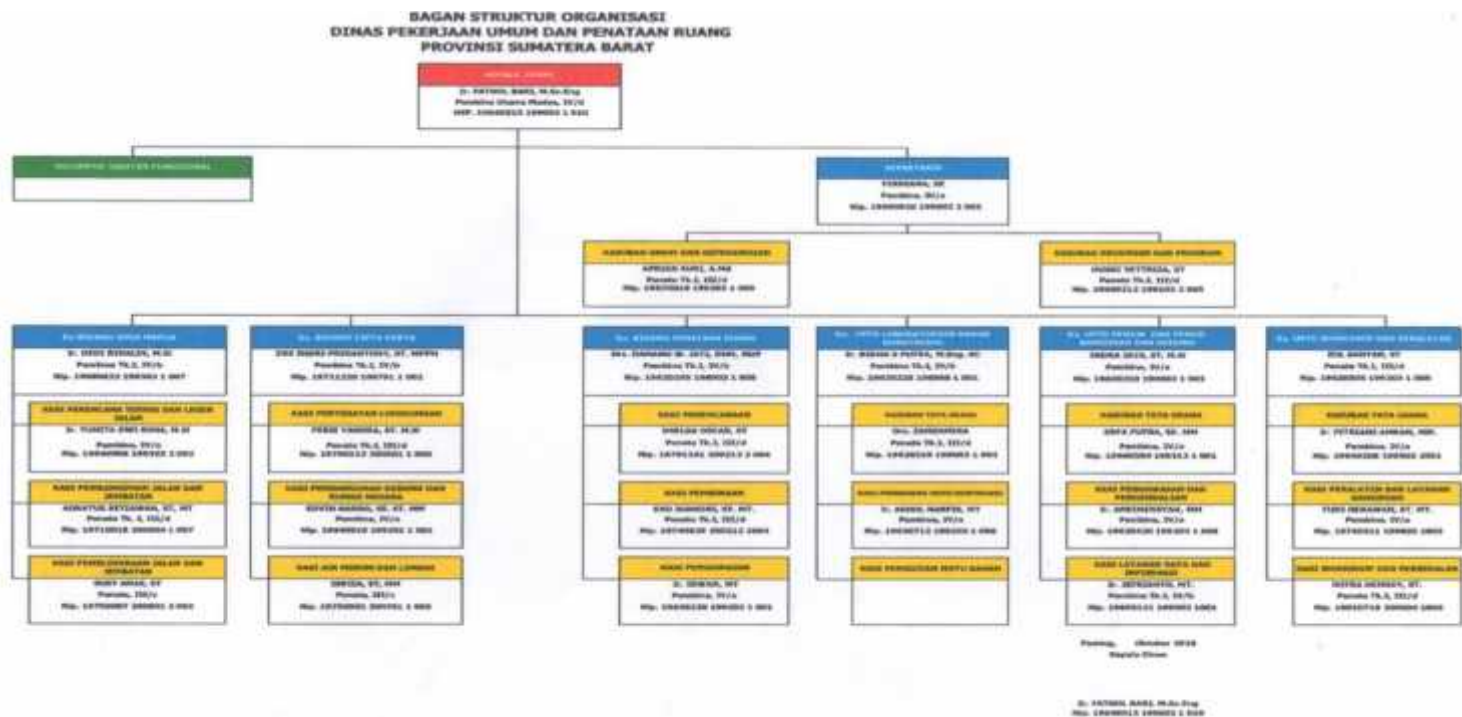
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dibentuk susunan organisasi dinas yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.2. Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Bidang Bina Marga
 - 3.1. Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan
 - 3.2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - 3.3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4. Bidang Cipta Karya
 - 4.1. Seksi Penyehatan Lingkungan
 - 4.2. Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Negara
 - 4.3. Seksi Air Minum dan Limbah
5. Bidang Penataan Ruang
 - 5.1. Seksi Perencanaan
 - 5.2. Seksi Pembinaan

- 5.3. Seksi Pengawasan
- 6. UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan
 - 6.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 6.2. Seksi Pengujian Mutu Konstruksi
 - 6.3. Seksi Pengujian Mutu Lingkungan
- 7. UPTD PIP2B
 - 7.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 7.2. Seksi Data dan Informasi
 - 7.3. Seksi Pengembangan dan Permukiman
- 8. UPTD Workshop dan Peralatan
 - 8.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 8.2. Seksi Peralatan dan Layanan Gangguan
 - 8.3. Seksi Workshop dan Perbekalan
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional

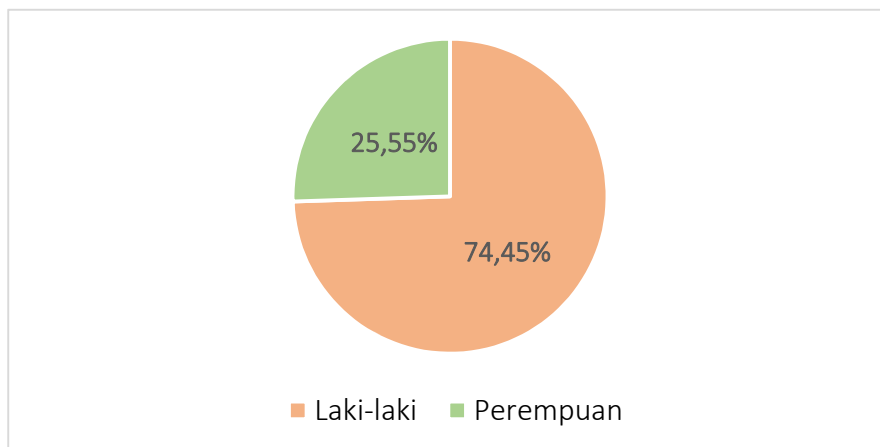
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai UPTD yang melaksanakan sebagian tugas teknis di bidang pengujian konstruksi dan lingkungan, PIP2PB dan UPTD Workshop dan Peralatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. dilengkapi juga dengan beberapa kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Secara lengkap bagan struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat terlihat berikut ini.

**Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Sumatera Barat**



1.3. Sumber Daya Manusia Organisasi

Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh 368 (Tiga ratus enam delapan) orang Pegawai Negeri Sipil dengan rincian sebagaimana pada diagram dibawah ini.



Gambar 1. 1
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018, berdasarkan Jenis Kelamin.

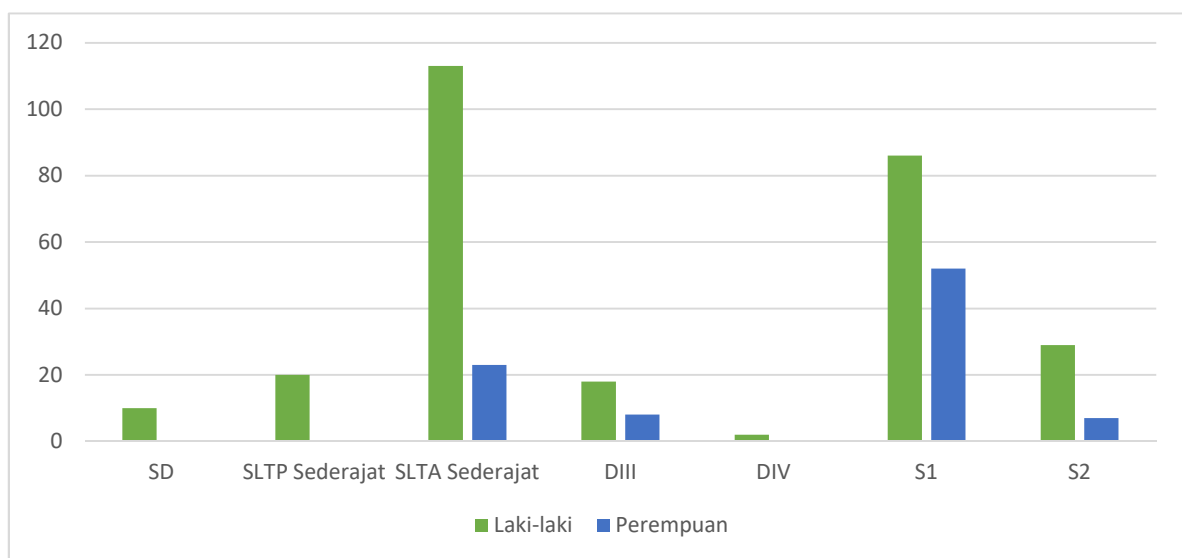
Tabel 1. 2
Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki-laki	274 orang	74,45%
Perempuan	94 orang	25,55%

Tabel 1. 3
Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
SD	10	0	10
SLTP Sederajat	20	0	20
SLTA Sederajat	113	23	136

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
DIII	18	8	26
DIV	2	0	2
S1	86	52	138
S2	29	7	36
Jumlah	278	90	368

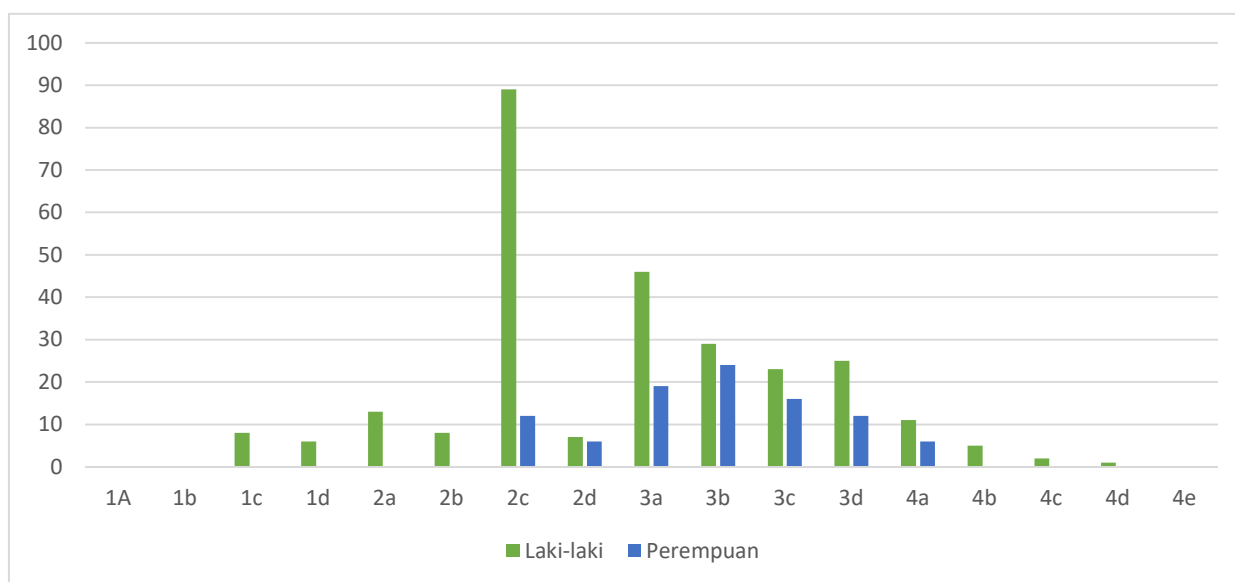


Gambar 1. 2
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018
berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
1A	0	0	0
1b	0	0	0
1c	8	0	8
1d	6	0	6
2a	13	0	13
2b	8	0	8
2c	89	12	101
2d	7	6	13

3a	46	19	65
3b	29	24	53
3c	23	16	39
3d	25	12	37
4a	11	6	17
4b	5	0	5
4c	2	0	2
4d	1	0	1
4e	0	0	0



Gambar 1. 3
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Golongan Tahun 2018

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat yang kemudian berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat terutama melalui pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, air minum, air limbah, pembangunan gedung atau bangunan negara serta penataan ruang. Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dilakukan dengan pembangunan dan peningkatan pada jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir, meningkatkan prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan, serta secara umum meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan. Dengan adanya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing wilayah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Prasarana air minum dan sanitasi yaitu 100% akses air minum dan 100% akses sanitasi yang layak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat juga memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan akan akses air minum dan sanitasi yang layak di Provinsi Sumatera Barat.

Peran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lainnya adalah dalam penyediaan pembangunan gedung negara dalam rangka rekonstruksi bangunan pasca gempa 2009. Selain itu, Dinas PUPR juga berperan dalam pembangunan Main Stadium Sumatera Barat, Gedung Kebudayaan dan Convention Hall.

Penataan Ruang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai daya dukung lingkungan dan berkelanjutan. Pada Tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat melakukan penyusunan rencana tata ruang pada kawasan strategis lingkungan hidup yaitu Danau Maninjau. Selain itu Dinas PUPUR juga melakukan revisi RTRW serta beberapa rencana tata ruang lainnya.

Adapun program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan perwujudan atas misi Gubernur yaitu Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas PUPR tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik semata, namun juga mengurangi kesenjangan antar kawasan, meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan.

1.5. Isu Strategis

Pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat menghadapi tantangan berat untuk terus berbenah menuju infrastruktur yang andal. Hal ini disebabkan karena pembangunan infrastruktur yang tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk Sumatera Barat.

Adapun upaya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas masih mengalami beberapa permasalahan, yaitu antara lain : (1) masih tingginya panjang jalan yang belum terhubung antar wilayah dan terisolir, (2) kemantapan jalan provinsi sebesar 72,058 % dengan deviasi yang cukup jauh dari kemantapan jalan nasional (89,42 %) sehingga perlu upaya pembangunan dan pemeliharaan agar mencapai setidaknya 75% pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra).

Adapun upaya pemenuhan kebutuhan dasar berupa akses air minum dan sanitasi layak masih mengalami berbagai kendala, yaitu (1) Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat; (2) perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pembangunan dan pemeliharaan aset; (3) kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan kriteria pembangunan infrastruktur; (4) terbatasnya ketersediaan dana pembangunan.

Dalam bidang Penataan Ruang, terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu (1) Masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan dan belum terbangunnya kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan utama pemanfaatan ruang; (2) rendahnya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang; (3) terbatasnya pedoman acuan pemanfaatan ruang dan upaya memasyarakatkannya.

Pembangunan infrastruktur telah menggerakkan ekonomi riil serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar khususnya di sektor jasa konstruksi. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jasa Konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global. Secara regulasi, hal tersebut telah memiliki payung hukum yang jelas dengan adanya UU Jasa Konstruksi mengenai klasifikasi dan kualifikasi, pelatihan tenaga kerja konstruksi, sertifikasi kompetensi kerja, registrasi pengalaman profesional, upah tenaga kerja konstruksi, dan pengaturan

tenaga kerja konstruksi asing serta tanggung jawab profesi. Dengan demikian, Dinas PUPR perlu mengawasi implementasi Undang-undang tersebut dan terus membina sektor jasa konstruksi agar dapat semakin baik dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang andal.

Selain faktor eksternal tersebut, permasalahan juga harus dihadapi dari sisi internal organisasi. Sesuai dengan Pergub No. 53 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat yang melakukan penggabungan tupoksi keuangan dan program dibawah Subag Keuangan dan Program dirasa terlalu berat dalam mengawasi kedua tupoksi tersebut secara bersamaan. Hal ini diperkuat dengan adanya Permendagri Nomor 106 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota tipe B memiliki sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 subbagian.

1.6. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-undang;
2. Ketetapan MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun 2018 Indikator pencapaian ekonomi makro pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
5. Pelaksanaan tugas di bidang keciptakarya, kebinamargaan serta bidang penataan ruang
6. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang keciptakarya, bidang kebinamargaan serta bidang penataan ruang.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD tahun anggaran 2018 meliputi hal berikut :

2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan anggaran pendapatan untuk tahun 2018 diarahkan pada peningkatan penerimaan retribusi daerah yang terdiri dari peningkatan penerimaan di bidang retribusi jasa sewa alat berat dan penerimaan retribusi workshop dan laboratorium balai uji dan penerimaan retribusi sewa alat berat.

2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengeluaran / belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- ↳ Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran
- ↳ Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat
- ↳ Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2018, ditempuh pendekatan *budget is a plan, a plan is budget*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran ini didukung oleh 9 (sembilan) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Selama 12 Bulan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	TersedianyaKebutuhan Jasa Telekomunikasi , PDAM, Listrik dan Internet Selama 12 Bulan
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Tersedianya Tenaga Untuk Kebersihan Sebanyak 24 orang, Tenaga Pengamanan Sebanyak 20 orang serta Sopir Kantor Sebanyak 10 Orang
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Selama 12 Bulan
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Kebutuhan Akan Barang Cetak dan Penggandaan/Fotocopy Yang Diperlukan Selama 12 Bulan
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat-alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Selama 12 Bulan
7.	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Per-UU	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 koran warta perundangan, 2 koran nasional, 6 koran lokal dan 4 tabloid lokal
8.	Rapat-Rapat Koordinasi dan	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas di

	Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	Dalam dan Luar Daerah Selama 12 Bulan
9.	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Terlaksananya kegiatan informasi, dokumentasi dan publikasi yaitu 20 publikasi/pariwara dan 1 keikutsertaan pada Sumbang Expo

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini didukung oleh 9 (sembilan) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya 7 Unit PC, 6 unit Notebook, 6 Unit Printer, dan 1 Unit Plotter
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Yaitu 1 Jaringan Instalasi Listrik, Sistem Pendingin Ruangan (AC) Type VRF, Serta 5 Gedung Kantor
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Berupa Suku Cadang 17 Unit Kendaraan Roda Empat & 1 Roda Enam, Jasa Service 20 Unit Roda 4, Premi Asuransi Untuk 27 Kendaraan Serta Pajak Kendaraan Dinas 25 Unit
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Mesin Fax, 4 Unit Genset, 6 Unit Pompa Air, 20 Tabung Pemadam, 16 unit PC, 16 Unit Notebook dan 16 Unit Printer
5.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Tersedianya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang SKPD, Serta Tunjuk Aset Yang Telah Dihilangkan ke Kabupaten/Kota Selama 12 Bulan
6.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Sejumlah 7 Unit
7.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu Spanduk 50 m, 4 Lemari Arsip Dorong, 4 Lemari Arsip dan 1 Proyektor, 2 Unit Videotron serta 2 Unit Drone, 1

		Rangka Baliho dan 90 m Umbul-Umbul/Merawa dan Roller Blind/Vertical Blind
8.	Pembangunan Fasilitas Penunjang Kantor Dinas PU dan Penataan Ruang Sumatera Barat	Terlaksananya Pembangunan 1 Pagar Kantor
9.	Renovasi Rumah Dinas PU dan Penataan Ruang Sumatera Barat	Terlaksananya Renovasi 1 unit Rumah Dinas Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur ini didukung oleh 1(satu) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian Karyawan PNS dan PTT Dinas PUPR sebanyak 392 Stel

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ini didukung oleh 1(satu) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan yaitu 20 Orang Pelatihan Luar Daerah dan 15 Orang Pelatihan Dalam Daerah

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3

		Dokumen
2.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya Kelancaran Penatausahaan Keuangan SKPD selama 12 bulan
3.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perjanjian Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (LAKIP, LKPJ, dan LPPD) Sejumlah 3 Laporan
4.	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Program Tahunan SKPD Secara Terpadu Yaitu 10 Laporan Bulanan dan 1 Laporan Akhir

VI. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program pembangunan jalan dan jembatan ini didukung oleh 22 (dua puluh dua) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Dokumen Lingkungan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi/ Strategis Provinsi serta Prasarana ke PU-an sebanyak 4 Dokumen yaitu Penyusunan Dokumen Lingkungan Jalan Lubuk Sikaping – Talu (P.096), Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Penyusunan Dokumen Lingkungan Jembatan Kuranji Kota Padang, Penyusunan laporan Pelaksanaan RKLRPL Pembangunan Infrastruktur ke PU an Kota Padang
2.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Kota Padang dan Kab.Pesisir Selatan	Terbangunnya Jalan Provinsi di Wilayah Kab.Pesisir Selatan yaitu Peningkatan Jalan Surantih–Kayu Aro–Langgai (P.086) sepanjang 3,325 km, Pembangunan Jalan Pasar Baru – Alahan Panjang (P.073) Paket I sepanjang 1.300 km, Pembangunan Drainase dan Bahu Jalan Pasar Baru – Alahan Panjang (P.073) Sepanjang 170 m
3.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Solok dan Kota Solok	Terbangunnya Jalan Provinsi di Wilayah Kab.Solok dan Kota Solok yaitu Pembangunan Jalan Pintu Angin – Labuah Saiyo (P. 094) Kab. Solok sepanjang 3,110

		km , Peningkatan Jalan Sp. Ganting Payo – Batas Tanah Datar – Sumani (P.092) Kab. Solok sepanjang 3,285 km, Pembangunan Jalan Pasar Baru – Alahan Panjang (P.073) Paket II Kab. Solok sepanjang 1,525 km, Pembangunan Bahu Jalan/Pasang Batu (P.082) Alahan Panjang – Kiliran Jao sepanjang 150 m, Pembangunan Bahu Jalan/Pasang Batu (P.093) Singkarak – Arian – Tj.Balit Padang Ganting sepanjang 100 m
4.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab.50 Kota dan Kota Payakumbuh	Terbangunnya Jalan Provinsi di Wilayah Kab.50 kota dan Kota Payakumbuh yaitu Peningkatan Jalan Palupuh – Pua Gaduh – Koto Tinggi (P. 090) Paket II Kab.50 Kota sepanjang 1,490 km, Peningkatan Jalan Lingkar Selatan (Payakumbuh) (P. 084) Kota Payakumbuh sepanjang 1,600 km, Peningkatan Jalan Provinsi Pangkalan Kapur Sembilan (P.076) Kab. 50 Kota sepanjang 0,500 km
5.	Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab.Pasaman dan Kab.Pasaman Barat	Terbangunnya jalan provinsi di wilayah Kab.Pasaman dan Kab.Pasaman Barat yaitu Pengamanan Badan Jalan Panti – Simpang Empat (P.031) Kab. Pasaman sepanjang 0,049 km, Pembangunan Jalan Tapus – Muara Sei. Lolo – Gelugur (P.101) Kab. Pasaman sepanjang 2,584 km
6.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab.Sijunjung dan Kab.Dharmasraya	Terbangunnya jalan provinsi di wilayah Kab.Sijunjung dan Kab.Dharmasraya yaitu Peningkatan Simp. Koto Baru – Junction (P.012) Kab. Dharmasraya yaitu Peningkatan Jalan Abai Sangir – Sei. Dareh (P.056.3) Kab. Dharmasraya sepanjang 1,100 km, Peningkatan Jalan 2 Jalur di Depan Kantor Bupati Ruas Jalan Tj. Ampalu – Sijunjung (P.008) Kab.Sijunjung 0,310 km, Pemotongan Tebing 2 Jalur di Depan Kantor Bupati Ruas Jalan Tj.Ampalu – Sijunjung (P.008) Kab.Sijunjung sepanjang 75 m

7.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab.Tanah Datar dan Kota Sawahlunto	Terbangunnya jalan provinsi di wilayah Kab.Tanah Datar dan Kota Sawahlunto yaitu Peningkatan Jalan Guguk Cino – Sawahlunto (Lapangan Segitiga) (P. 038) Kota Sawahlunto sepanjang 0,930 km, Peningkatan Jalan Simp. Baso – Piladang (P.079) Kab. Tanah Datar sepanjang 1,054 km
8.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab.Agam dan Kota Bukittinggi	Terbangunnya jalan provinsi di wilayah Kab.Agam dan Kota Bukittinggi yaitu Peningkatan Jalan Matur – Palembayan (P.080) Kab. Agam sepanjang 1,127 km, Peningkatan Jalan Palembayan – Palupuh (Simp. Patai) (P. 081) Kab. Agam sepanjang 1,050 km, Peningkatan Jalan Palupuh – Pua Pagadih – Koto Tinggi(P.090) Paket I Kab. Agam sepanjang 1,025 km, Lanjutan Pembangunan Jalan Padang Koto Gadang – Palembayan (P. 088) Kab. Agam, Jalan Manggopoh – Padang Luar (P. 025) (Dari Bayur menuju Maninjau) Kab. Agam sepanjang 0,715 km, Pembangunan Saluran Drainase dan Bahu Jalan kelok 44 sepanjang 175 m
9.	Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab.Solok Selatan	Terbangunnya jalan provinsi di wilayah Kab.Solok Selatan sepanjang 1,639 Km yaitu Peningkatan Jalan Simp. Padang Aro – Lubuk Malako (P.056.1) sepanjang 1,639 km
10.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab.Kepulauan Mentawai	Terbangunnya Jalan Provinsi dan di Wilayah Kab. Kep. Mentawai sepanjang 1,115 Km yaitu Pembangunan Jalan Kantor Camat – Berkat (P.104) sepanjang 1,115 km
11.	Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah – I	Terbangunnya jembatan wilayah – I (Kota Padang) sepanjang 80 m yaitu Jembatan Lolong (P.099) sepanjang 80 m
12.	Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah – II	Terbangunnya jembatan provinsi wilayah – II (Kab.Agam dan Kab.50 Kota) sepanjang 50 m yaitu Jembatan Batang Sopan (P.076), Jembatan Lubuk Gadang (P.088) sepanjang

		50 m
13.	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan dan Koordinasi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan/Jembatan Sumatera Barat serta Jalan Tol (1 laporan tahunan)
14.	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Pembebasan Lahan seluas 67.100 M ² untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Ruas Jalan Baso – Piladang P.079 (2 Km) Kec. Akabiluru, Ruas Jalan Matur – Palembang P.080 (1,5 Km) Kec. Matur, Ruas Jalan Palembang – Palupuh P.081 (2 Km) Kec. Palembang, Ruas Jalan Padang Koto Gadang – Palembang P.088 (1 Km), Ruas Jalan manggopoh – Padang Luar P.025 (1 km) Ruas Jalan Bungus Teluk kabung – Mandeh – Tarusan P.083 Kec. Bungus TI Kabung, Ruas Jalan Duku – Ketaping P.075 (1,5 Km) Kec. Ulakan Tapakis
15.	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis	Terlaksananya Pembebasan Lahan seluas 5.335 M ² Untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis di Jalan dan Jembatan Kuranji, Fly Over Jalur Kereta Api Ruas Jalan Duku – Lb. Alung dan Persiapan Pengurusan Lahan Jalan Tol Padang – Pekanbaru
16.	Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum	Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum Wilayah Sumbar
17.	Perencanaan Pembangunan Jalan Provinsi	Terlaksananya Penyusunan DED Jembatan Provinsi sebanyak 7 Dokumen yaitu DED Pengaman Jalan Simancung – Tj. Ampalu (P.007), DED Pengaman Jalan Singkarak – Arian – Tj.Balit – Padang Ganting (P.093), DED Pengaman Jalan Palupuh – Pua Gaduh – Koto tinggi (P.090), DED Pengaman Jalan Simpang Manggopoh – Padang Luar (P.025), DED Pengaman Jalan Provinsi Guguk Cino – Sawahlunto (P.038), DED Jalan Duku – Sicincin (Akses Menuju Main Stadium), DED Jalan Akses Jembatan

		Kuranji
18.	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	Terlaksananya Penyusunan DED Jembatan Provinsi sebanyak 3 Dokumen yaitu DED Jembatan Lubuk Gadang II (P.088), DED Jembatan Provinsi (Ruas Jalan Pasar Baru – Alahan Panjang (P.073), DED Jembatan Cubadak (P.073)
19.	Penyusunan Database dan Survey Jalan dan Jembatan Provinsi	Terlaksananya Penyusunan BMS serta Updating Dokumen IRMS dan Dokumen Leger Jalan dan Jembatan Provinsi sebanyak 3 dokumen
20.	Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	Terlaksananya pengawasan pembangunan jalan dan jembatan sebanyak 6 Paket Pengawasan Terhadap Pembangunan Peningkatan 26 Ruas Jalan provinsi dan 2 unit jembatan dan 6 paket pengadaan langsung
21.	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi DAK	Terbangunnya jalan provinsi DAK sepanjang 5,10 Km yaitu Pembangunan Jalan Teluk Bayur – Nipah – Purus DAK (P.098) Kota Padang sepanjang 1,900 km, Pembangunan Jalan Bungo Tanjung – Teluk Tapang DAK (P.097) Kab. Pasaman Barat sepanjang 7,300 km, Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping – Talu DAK (P.096) Kab. Pasaman Barat sepanjang 6,500 km
22.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kota Pariaman dan Kab.Padang Pariaman	Terbangunnya jalan provinsi di wilayah Kab.Padang Pariaman yaitu Pembangunan Jalan Simpang Duku (Ketaping) – Pariaman (P.075) Kab. Padang Pariaman sepanjang 0,451 km – Pekerjaan rigid bahu jalan paket Duku (Ketaping) Pariaman (P.075) sepanjang 200 m

VII. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan ini didukung oleh 16 (enam belas) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi dan Bangunan Pelengkap Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi sepanjang 100 m
2.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Bukittinggi dan Agam Timur	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi yang terletak di wilayah Kab.Agam Timur dan Kota Bukittinggi sepanjang 109,67 Km dan 1 Paket Rehabilitasi Drainase Diperkeras/Rigid Bahu Jlan Ruas Jalan Baso – Piladang
3.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.50 Kota dan Kota Payakumbuh	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi yang terletak di wilayah Kab.50 Kota dan Kota Payakumbuh sepanjang 118,32 Km dan 7 Paket Pekerjaan yaitu – Paket Perbaikan Badan Jalan Provinsi Pada Ruas Jalan Pangkalan–Sialang–Gelugur, (P.076) sepanjang 68 m – Paket Pasangan Batu Penahan Badan Jalan Pada Ruas Jalan Payakumbuh – Suliki–Koto Tinggi (P.069.2) sepanjang 34 m
4.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.Tanah Datar dan Kota Padang Panjang	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi yang terletak di wilayah Kab.Tanah Datar dan Kota Padang Panjang sepanjang 125,92 Km dan 3 Paket – Paket Saluran Tertutup Ruas Jalan Baso – Batusangkar sepanjang 100 m, –Paket Saluran Tertutup Ruas Jalan Batas Payakumbuh – Sitangkai sepanjang 106 m, –Paket Pasangan Batu Ruas Jalan Baso – Batusangkar sepanjang 15 m.
5.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.Padang Pariaman dan Kota Pariaman dan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi yang terletak di wilayah Kab.Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota

	Kota Padang	Padang sepanjang 80,84 Km dan 1 paket –Paket Bahu Beton,pasangan bahu dan saluran di ruas jalan Teluk Bayur – Nipah – Purus sepanjang 229 m.
6.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.Solok dan Kota Solok	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi yang terletak di wilayah Kab.Solok, Kota Solok sepanjang 106,31 Km dan 1 paket –Paket pemeliharaan jalan ruas Sumani – Sp. Ganting Payo sepanjang 23,50 m.
7.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.Solok Selatan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi yang terletak di wilayah Kab.Solok Selatan sepanjang 116,38 Km
8.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Sawahlunto, Kab.Sijunjung dan Kab.Dharmasraya	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi yang terletak di wilayah Kota Sawahlunto,Kab.Sijunjung,Kab. Dharmasraya 161,96 Km.
9.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.Pesisir Selatan dan Kab.Kep.Mentawai	TerlaksananyaRehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.Pesisir Selatan sepanjang 56,34 Km dan 1 Paket –Paket Pemeliharaan bandan jalan ruas Surantih – Kayu Aro – Langgai sepanjang 27.70 m.
10.	Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan	Terkontrol dan Terpeliharanya Peralatan Jalan dan Jembatan sebanyak 62 unit
11.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Agam	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi yang terletak di Kab. Agam sepanjang 90 Km.
12.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Pasaman	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi yang terletak di wilayah Kab.Pasaman dan Kab.Pasaman Barat sepanjang 126,73 Km dan 3 paket. – Pembuatan Saluran Drainase Jalan Panti–Simpang Empat (P.031) 153 m. –Pembuatan Saluran Drainase Jalan Rao – Rokan (P.095) 137 m. –Rigid bahu jalan Tapus – Moaro – Sungai

		Lolo (P.101) 80 m
13.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Pasaman Barat	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi yang terletak di Kab. Pasaman Barat sepanjang 110,10 Km
14.	Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah I	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah I Sumatera Barat sepanjang 2 Paket (8,735) dan 1 Paket. -Paket berkala Wilayah I di ruas jalan Lubuk Basung– Sungai Limau Sepanjang 200 m.
15.	Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah II	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah I Sumatera Barat sepanjang 2 Paket (6.70 km) dan satu Paket. -Paket Berkala Wilayah II di Ruas Jalan Inderapura–Muara Sakai 120 m.
16.	Pengadaan Peralatan dan Bahan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Rehabilitas dan Pemeliharaan Jalan Provinsi 6 Paket (2 unit Backhoe Loader, 200 buah patok km, 500 lbr bronjong, 200 m guard rail, 1 unit Excavator, 4 unit Roller)

VIII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Laboratorium ke Binamargaan	Tersedianya Peralatan dan Alat Ukur untuk Laboratorium UPTD
2.	Kegiatan Pengadaan Alat-alat Ukur dan Laboratorium ke Binamargaan	Tersedianya peralatan dan Alat Ukur untuk Laboratorium UPTD sebanyak 4 Paket.
3.	Monitoring Pengendalian Mutu UPTD	Terkendalinya mutu bahan untuk pekerjaan ke PU-an sebanyak 1 Kegiatan dan 1 Laporan Tahunan.

IX. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah

Program pengembangan sistem pengelolaan air limbah ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Pendampingan Program Sanimas IDB dan PPSP	Terlaksananya Pendampingan Aparatur Kab/Kota Bidang Teknis Program Sanimas IDB dan PPSP sebanyak 3x Kegiatan (174 orang)
2.	Pembinaan Penyusunan Masterplan Sanitasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Masterplan Sanitasi Kab/Kota sebanyak 3x Kegiatan (196 orang)
3.	Penyusunan Profil Pengelolaan Sanitasi Provinsi Sumatera Barat	Tersusun Profil Sanitasi Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2 dokumen

X. Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ini didukung oleh 21 (dua puluh satu) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat (Lanjutan)	Terlaksananya Pembangunan Bangunan Gedung Stadium Utama Sumatera Barat sebanyak 1 Unit
2.	Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat (Lanjutan)	Terlaksananya Pembangunan Bangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat sebanyak 1 Unit
3.	Pembangunan Gedung Utama Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat	Adanya Dokumen lingkungan dan studi kelayakan sebanyak 2 Dokumen
4.	Pembangunan Gedung Convention Hall Sumatera Barat (Lanjutan)	Terlaksananya Pembangunan Bangunan Gedung Strategis Provinsi sebanyak 1 Unit
5.	Pembangunan Gedung Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Pembangunan Bangunan Gedung Strategis Provinsi sebanyak 1 Unit
6.	Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara	Terehabilitasinya Bangunan Gedung Pemerintah Provinsi sebanyak 2 Unit

7.	Penyelenggaraan Hari Pers Nasional	Terlaksananya Dukungan Penyelenggaraan Hari Pers Nasional sebanyak 1 Unit
8.	Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara	Terehabilitasinya Bangunan Gedung Pemerintahan Provinsi sebanyak 2 Unit
9.	Pembangunan Gedung Pengendali Inflasi Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Provinsi Sebanyak 1 Unit
10.	Penambahan Garase Rumah Dinas Gubernur	Terlaksananya Penambahan Garase Rumah Dinas Gubernur dan Bangunan Pendukung Lainnya sebanyak 1 Unit
11.	Pembangunan Taman Wisata Kelok Sembilan	Tersedianya Perencanaan Pembangunan Taman Wisata kelok Sembilan sebanyak 4 Dokumen
12.	Pendampingan Pembinaan Pengelolaan Rumah Negara di Sumatera Barat	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Pengelolaan Rumah Negara di Sumatera Barat
13.	Penyelenggaraan Layanan Konsultasi Teknis dan Advokasi Serta Tersedianya Data Informasi Teknis Bidang Keciaptakaryaan	Terlaksananya Pelayanan Konsultasi Teknis dan Informasi sebanyak 1 kali untuk 80 orang
14.	Pembinaan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)	Terlaksananya Pembinaan Fasilitas TABG sebanyak 1 kali untuk 102 orang/19 Kab/Kota.
15.	Assesmen Bangunan Gedung dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Assesmen Bangunan Gedung di 19 Kabupaten/Kota
16.	Rekonstruksi Bangunan Pasca I	Terlaksananya Rekonstruksi Pasca Bencana Sebanyak 1 Unit
17.	Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Musholla Jabal Rahmah di Painan (lanjutan)	Terlaksananya Pembangunan Shelter di Mushola Jabal Rahman Di Painan (Lanjutan) Sebanyak 1 Paket
18.	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Dispora Sebanyak 1 Unit
19.	Pembangunan Lapangan Tenis Gubernur (lanjutan)	Terlaksananya Pembangunan Lapangan Tenis Indoor di Komplek Gubernur Sebanyak 1 Unit

20.	Rekonstruksi Bangunan Pasca Bencana II	Tersedianya Gedung Kantor Dinas Instansi sebanyak 1 Unit
21.	Penyusunan Masterplan Pasar Koto Baru	Adanya Dokumen Masterplan Pembangunan Pasar Koto Baru sebanyak 1 Dokumen

XI. Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi

Program bimbingan teknis peningkatan jasa konstruksi ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Penyusunan Ranperda SMM	Tersusunnya Ranperda Sistem Manajemen Mutu sebanyak 1 ranperda
2.	Bimbingan Teknis/Workshop Jasa Konstruksi	Kegiatan Pelatihan Penata usaha Keuangan, Kegiatan Pelatihan Aspek Hukum Kontrak, Kegiatan Pelatihan Penyusunan HPS, Kegiatan Bimtek Sistem Manajemen Mutu, Kegiatan Bimtek K3, Kegiatan Pelatihan pengawasan Pekerjaan Konstruksi, Kegiatan Pelatihan pengelolaan teknis Bangunan Negara dan Kegiatan Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Sebanyak 1 Dokumen (8x kegiatan, 400 Orang)
3.	Lokakarya, Sosialisasi dan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi	Kegiatan Lokakarya Road Safety, kegiatan Sosialisasi Tentang penilai Ahli, Kegiatan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi (2 kali), Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang No.11 Tahun 2014 Tentang insinyur (1 kali) dan kegiatan Lokakarya dan Sosialisasi Permen PU No 31 Tahun 2015 (1 kali) sebanyak 1 Dokumen (7x kegiatan, 350 orang)
4.	Kegiatan Update Profil Jasa Konstruksi	Dokumen Profil Jasa konstruksi sebanyak 1 Laporan
5.	Penyusunan Ranperda SMK3	Tersusunnya Ranperda SMK3 sebanyak 1 Ranperda
6.	Sertifikasi Ahli Muda	Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu sebanyak 1

	Dokumen (1xkegiatan,60 orang)
--	-------------------------------

XII. Program Perencanaan Penataan Ruang

Program Perencanaan Penataan Ruang ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Terlaksananya Penyusunan Zoning Regulation Kawasan Wisata Mandeh Kab.Pesisir Selatan sebanyak 1 Dokumen
2.	Proses Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Terlaksananya Proses Legalisasi Ranperda Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau dan Danau Singkarak sebanyak 2 Perda
3.	Pelatihan Pemetaan Tata Ruang	Terlaksananya Pelatihan Interpretasi Citra Satelit dan Penyusunan Peta Tematik Rencana Tata Ruang sebanyak 3 Kali Kegiatan,180 orang peserta
4.	Penyusunan Database ke PU an dan Tata Ruang Provinsi / Kabupaten / Kota	Terlaksananya Penjaringan Data dan Informasi Penataan Ruang Kabupaten/Kota/ Provinsi Sumatera Barat
5.	Legalisasi Perda Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Proses Legalisasi Revisi Perda RTRW Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1 perda
6.	Koordinasi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat/ BKPRD sebanyak 5 kali kegiatan, 300 orang,dan 19 Kabupaten/Kota
7.	Peningkatan Pemahaman Pemangku Kepentingan Terhadap Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang–Undangan Bidang Penataan Ruang di 19 Kabupaten/Kota (5x kegiatan,350 Orang)
8.	Penyebarluasan Informasi dan Bahan Komunikasi Penataan Ruang	Terlaksananya Kampanye Publik Penataan Ruang Melalui Media Masa pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

XIII. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Pengawasan Teknis SPM Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Teknis SPM Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen, 3 kali pertemuan, 150 Orang.
2.	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Operasional PPNS Bidang Penataan Ruang sebanyak 1 Dokumen
3.	Monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya Monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang sebanyak 1 Dokumen (1 laporan Tahunan)

XIV. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi	Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi UPTD sebanyak 1 Kegiatan

XV. Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi

Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Pembangunan Drainase Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi
2.	Survey Drainase Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi
3.	Pembangunan Drainase Kab.Tanah Datar dan Kota Padang Panjang	Terbangunnya Drainase Kewenangan Provinsi.

4.	Pembangunan Drainase Kab.Solok dan Kota Solok	Terbangunnya Drainase Kewenangan Provinsi.
----	---	--

XVI. Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kabupaten/Kota ini didukung oleh 5 (lima) kegiatan yang memiliki target kinerja sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciaptakarya di Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Laporan Pengendalian Kegiatan Keciaptakarya di Provinsi Sumatera Barat untuk 12 Laporan Bulanan dan 1 Laporan Tahunan
2.	Pembinaan Kegiatan PAMSIMAS di Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Kegiatan Pamsimas di 15 Kab/Kota
3.	Penyusunan Rencana Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) Regional di Provinsi Sumatera Barat	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum Regional sebanyak 4 Dokumen
4.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) di Provinsi Sumatera Barat Wilayah I	Dokumen Pengembangan Lingkungan Hidup Adanya Kebijakan dan Strategi Air Minum Provinsi Sumbang sebanyak 2 dokumen
5.	Peningkatan Sistem Pelayanan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) Kawasan Palangai – Nyiur Melambai Kab.Pesisir Selatan	Instalasi Jaringan Air Minum di 1 Kawasan pada 1 Kab/Kota.

2.4 Adapun Output pencapaian target kinerja program

1. Program pelayanan administrasi perkantoran ini didukung oleh 9 (sembilan) kegiatan dengan anggaran Rp. 5.125.016.140,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.667.332.355,- (91,07 %) dengan output meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini didukung oleh 9 (sembilan) kegiatan dengan anggaran Rp. 6.986.908.167,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.717.495.820,- (96,14 %) dengan output meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.

3. Program peningkatan disiplin aparatur ini didukung oleh 1(satu) kegiatan dengan anggaran Rp. 309.819.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 299.822.000,- (96,77 %) dengan outout meningkatnya disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ini didukung oleh 1(satu) kegiatan dengan anggaran Rp. 185.148.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 161.967.795,- (87,48 %) dengan output meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan dengan anggaran Rp. 1.369.035.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.258.727.796,- (91,94 %) dengan output meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6. Program pembangunan jalan dan jembatan ini didukung oleh 22 (dua puluh dua) kegiatan dengan anggaran Rp. 204.488.943.817- dengan realisasi sebesar Rp. 181.077.032.125,- (88,55 %) dengan output meningkatnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana jalan dan jembatan untuk ekonomi rakyat di provinsi Sumatera Barat
7. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan ini didukung oleh 16 (enam belas) kegiatan dengan anggaran Rp. 65.298.230.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 62.760.807.356,- (96,11 %) dengan output terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi.
8. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Rp. 1.982.623.465,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.967.517.728,- (99,24 %) dengan output terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana ke PUan
9. Program pengembangan sistem pengelolaan air limbah ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Rp. 836.941.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 711.142.859,- (84,97 %) dengan output meningkatnya pengelolaan dan pengembangan system air limbah
10. Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ini didukung oleh 21 (dua puluh satu) kegiatan dengan anggaran Rp.

157.341.202.743,- dengan realisasi sebesar Rp. 143.245.064.585,- (91,04 %) dengan output meningkatnya penataan bangunan dan lingkungan.

11. Program bimbingan teknis peningkatan jasa konstruksi ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan dengan anggaran Rp. 1.463.838.965,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.232.310.365,- (84,18 %) dengan output peningkatan pengetahuan pelaku jasa konstruksi
12. Program Perencanaan Penataan Ruang ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan dengan anggaran Rp. 4.929.252.510,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.140.183.131,- (83,99 %) dengan output tercapainya kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang lebih tinggi.
13. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Rp. 479.701.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 325.983.700,- (67,96 %) dengan output tercapainya kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang lebih tinggi.
14. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Rp. 302.700.755,- dengan realisasi sebesar Rp. 285.188.972,- (94,21 %) dengan output terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
15. Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan dengan anggaran Rp. 638.335.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 630.330.148,- (98,75 %) dengan outputnya Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi.
16. Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kabupaten/Kota ini didukung oleh 5 (lima) kegiatan dengan anggaran Rp. 2.771.215.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.402.645.594 (50,61 %) dengan output meningkatnya pengelolaan air minum dan air limbah masyarakat.

2.5 Adapun Outcome pencapaian target kinerja program

1. Program pelayanan administrasi perkantoran ini didukung oleh 9 (sembilan) kegiatan dengan anggaran Rp. 5.125.016.140,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.667.332.355,- (91,07 %) dengan outcome

terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini didukung oleh 9 (sembilan) kegiatan dengan anggaran Rp. 6.986.908.167,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.717.495.820,- (96,14 %) dengan outcome terpenuhinya kebutuhan untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan disiplin aparatur ini didukung oleh 1(satu) kegiatan dengan anggaran Rp. 309.819.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 299.822.000,- (96,77 %) dengan outcome terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian karyawan PNS dan PTT Dinas PUPR
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ini didukung oleh 1(satu) kegiatan dengan anggaran Rp. 185.148.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 161.967.795,- (87,48 %) dengan outcome terpenuhinya tenaga yang paham dan mengerti peraturan dan perundang-undangan.
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan dengan anggaran Rp. 1.369.035.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.258.727.796,- (91,94 %) dengan outcome tersusunnya Perjanjian Kinerja SKPD dan laporan capaian kinerja SKPD (LAKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan tahunan).
6. Program pembangunan jalan dan jembatan ini didukung oleh 22 (dua puluh dua) kegiatan dengan anggaran Rp. 204.488.943.817,- dengan realisasi sebesar Rp. 181.077.032.125,- (88,55 %) dengan output meningkatnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana jalan dan jembatan untuk ekonomi rakyat di provinsi Sumatera Barat
outcomenya terbangun / peningkatan jalan menuju daerah terisolir sepanjang 15,62 km, terbangun / peningkatan jalan daerah wisata sepanjang 6,83 km, terbangunnya jalan daerah menuju pelabuhan laut / udara sepanjang 9,20 km dan peningkatan jalan sepanjang 17,66 km untuk penunjang Kemantapan dengan persentase capaian 72,058%
7. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan ini didukung oleh 16 (enam belas) kegiatan dengan anggaran Rp. 65.298.230.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 62.760.807.356,- (96,11 %) dengan output terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi.

Outcome : terpeliharanya kemantapan jalan kondisi jalan provinsi sepanjang 1.182,67 km

8. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Rp. 1.982.623.465,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.967.517.728,- (99,24 %) dengan outcome meningkatkan mutu dan pelayanan laboratorium UPTD.
9. Program pengembangan sistem pengelolaan air limbah ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Rp. 836.941.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 711.142.859,- (84,97 %) dengan outcome meningkatnya kinerja Sanimas IDB dan PPSP.
10. Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ini didukung oleh 21 (dua puluh satu) kegiatan dengan anggaran Rp. 157.341.202.743,- dengan realisasi sebesar Rp. 143.245.064.585,- (91,04 %) dengan outcome terbangunnya sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan sebanyak 8 unit.
11. Program bimbingan teknis peningkatan jasa konstruksi ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan dengan anggaran Rp. 1.463.838.965,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.232.310.365,- (84,18 %) dengan outcome meningkatnya pengetahuan pelaku jasa konstruksi .
12. Program Perencanaan Penataan Ruang ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan dengan anggaran Rp. 4.929.252.510,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.140.183.131,- (83,99 %) dengan outcome tersedianya perencanaan penataan ruang.
13. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Rp. 479.701.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 325.983.700,- (67,96 %) dengan outcome meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang.
14. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Rp. 302.700.755,- dengan realisasi sebesar Rp. 285.188.972,- (94,21 %) dengan outcome meningkatnya kinerja UPTD Laboratorium Konstruksi dan Lingkungan.
15. Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan dengan anggaran Rp. 638.335.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 630.330.148,- (98,75 %) dengan outcome terbangunnya drainase lintas Kabupaten/Kota.

16. Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kabupaten/Kota ini didukung oleh 5 (lima) kegiatan dengan anggaran Rp. 2.771.215.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.402.645.594 (50,61 %) dengan outcome terlaksananya pembangunan P/S Air Minum.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2018, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan) sebesar Rp.1.424.670.430 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan Belanja daerah untuk SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat sejumlah Rp. 483.181.721.020,10 direncanakan untuk membiayai :

)	Belanja Pegawai	Rp. 28.429.564.605,00
)	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 50.121.982.295,00
)	Belanja Modal	Rp. 360.761.570.207,86

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

2. Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018 diperoleh realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.424.670.430,00

Secara rinci capaian perolehan pendapatan 2018 jika dibanding dengan anggaran tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Pendapatan Tahun 2018

A	PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Lebih/Kurang
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.060.000.000	1.424.670.430	134,40	364.670.430
1	Pendapatan Pajak	-	-	-	-

	Daerah				
2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.060.000.000	1.424.670.430	134,40	364.670.430

Pada tabel di atas terlihat realisasi pendapatan asli daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan permukiman sebesar 134,40 %. Yang berasal dari pendapatan retribusi daerah. Jika ditinjau dari realisasi pendapatan yang ditargetkan maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah berhasil mencapai target pendapatan retribusi daerah yang telah ditetapkan. Adapun sumber pendapatan retribusi tersebut terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp.1.424.670.430 berupa retribusi laboratorium senilai Rp. 624.571.430 dan retribusi alat berat senilai Rp.800.099.000

3. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb:

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
B	BELANJA	483.181.721.020,10	439.313.117.107,86	90,92	43.868.603.912,24
I	BELANJA OPERASI	81.559.617.235,10	78.551.546.900	96,31	3.008.070.335,10
1	Belanja Pegawai	28.672.808.958,10	28.429.564.605	99,15	243.244.353,10
2	Belanja Barang	52.886.808.277	50.121.982.295	94,77	2.764.825.982
II	BELANJA MODAL	401.622.103.785	360.761.570.207,86	89,83	40.860.533.577,14
1	Belanja Tanah	19.086.767.500	4.202.252.040	22,02	14.884.515.460
2	Belanja Peralatan dan Mesin	10.290.040.626	8.121.350.731,86	78,92	2.168.689.894,14
3	Belanja Gedung dan Bangunan	157.836.258.859	143.878.174.189	91,16	13.958.084.670
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	214.409.036.800	204.559.793.247	95,41	9.849.243.553
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0,00	0.00

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 adalah sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran ini terdiri atas 9 (sembilan) kegiatan yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.820.000	6.752.859	67.141	99,02
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	1.669.800.000	1.398.219.945	271.580.055	83,74
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	1.791.555.390	1.756.903.555	34.651.835	98,07
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	178.711.000	178.493.590	217.410	99,88
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	142.365.750	125.931.180	16.434.570	88,46
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	26.327.600	3.672.400	87,76
7.	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Per-UU	30.000.000	29.996.000	4.000	99,99
8.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	950.764.000	833.237.263	117.526.737	87,64
9.	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	325.000.000	31.470.363	13.529.637	95,84

II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini terdiri atas 4 (empat) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	384.991.700	354.336.700	30.655.000	92,04
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.266.521.316	1.212.734.700	53.786.616	95,75
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	409.400.000	405.030.053	4.369.947	98,93
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.850.000	81.626.557	24.223.443	77,12
5.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	315.028.000	243.290.559	71.737.441	77,23
6.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	1.894.201.251	1.894.201.250,86	0,14	100
7.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.322.961.400	1.250.857.000	72.104.400	94,55
8.	Pembangunan Fasilitas Penunjang Kantor Dinas PU dan Penataan Ruang Sumatera Barat	360.000.000	357.788.000	2.212.000	99,39
9.	Renovasi Rumah Dinas PU dan Penataan Ruang Sumatera Barat	927.954.500	917.631.000	10.323.500	98,89

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur ini terdiri atas 1(satu) kegiatan yang memiliki yang

memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	309.819.200	299.822.000	9.997.200	96,77

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	185.148.000	161.967.795	23.180.205	87,48

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ini terdiri atas 4 (empat) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	247.335.000	215.886.042	31.448.958	87,28
2.	Penatausahaan Keuangan SKPD	791.700.000	785.450.000	6.250.000	99,21
3.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	250.000.000	192.343.763	57.656.237	76,94
4.	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	80.000.000	65.047.991	14.952.009	81,31

VI. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Program pembangunan jalan dan jembatan ini terdiri atas 22 (dua puluh dua) kegiatan yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat	919.816.700	911.343.209	8.473.491	99,08
2.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Kota Padang dan Kab.Pesisir Selatan	7.760.310.900	7.748.750.850	11.560.050	99,85
3.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Solok dan Kota Solok	27.361.349.400	27.352.454.600	8.894.800	99,97
4.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab.50 Kota dan Kota Payakumbuh	10.297.251.700	10.268.177.700	29.074.000	99,72
5.	Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab.Pasaman dan Kab.Pasaman Barat	11.463.198.200	11.459.817.350	3.380.850	99,97
6.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab.Sijunjung dan Kab.Dharmasraya	13.219.999.000	13.218.918.950	1.080.050	99,99
7.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab.Tanah Datar dan Kota Sawahlunto	11.742.896.700	10.557.404.479	1.185.492.221	89,90
8.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab.Agam dan Kota Bukittinggi	25.279.632.000	25.275.414.984	4.217.016	99,98
9.	Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di				

	Wilayah Kab.Solok Selatan	10.825.704.800	10.821.169.800	4.535.000	99,96
10.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab.Kepulauan Mentawai	4.984.423.800	4.979.475.000	4.948.800	99,90
11.	Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah – I	9.529.042.800	9.511.768.500	17.274.300	99,82
12.	Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah – II	14.127.563.500	11.191.081.300	2.936.482.200	79,21
13.	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi	821.948.650	777.555.185	44.393.465	94,60
14.	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan	11.200.000.000	3.963.882.728	7.236.117.272	35,39
15.	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis	7.886.767.500	238.369.312	7.648.398.188	3,02
16.	Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum	54.618.800	54.179.458	439.342	99,20
17.	Perencanaan Pembangunan Jalan Provinsi	599.994.800	593.555.518	6.439.282	98,93
18.	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	483.169.000	480.741.662	2.427.338	99,50
19.	Penyusunan Database dan Survey Jalan dan Jembatan Provinsi	1.172.052.667	925.721.196	246.331.471	78,98
20.	Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	6.674.484.000	6.464.473.163	210.010.837	96,85
21.	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis	22.662.000.000	18.878.765.861	3.783.234.139	83,31

22.	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kota Pariaman dan Kab.Padang Pariaman	5.422.718.900	5.404.011.320	18.707.580	99,66
-----	---	---------------	---------------	------------	-------

VII. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan ini terdiri atas 16 (enambelas) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi dan Bangunan Pelengkap Jalan	3.261.727.800	2.971.851.094	289.876.706	91,11
2.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Bukittinggi dan Agam Timur	3.102.564.000	3.101.701.200	862.800	99,97
3.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.50 Kota dan Kota Payakumbuh	4.949.178.500	4.944.719.190	4.459.310	99,91
4.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.Tanah Datar dan Kota Padang Panjang	3.464.000.000	3.458.576.410	5.423.590	99,84
5.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.Padang Pariaman dan Kota Pariaman dan Kota Padang	2.373.808.000	2.346.548.100	27.259.900	98,85
6.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.Solok dan Kota Solok	2.986.084.000	2.984.141.450	1.942.550	99,93
7.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.Solok Selatan	2.755.435.000	2.755.356.160	78.840	100

8.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Sawahlunto, Kab.Sijunjung dan Kab.Dharmasraya	3.074.829.000	3.074.066.612	762.388	99,98
9.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.Pesisir Selatan dan Kab.Kep.Mentawai	3.026.260.000	2.966.017.350	60.242.650	98,01
10.	Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan	1.200.000.000	1.160.823.471	39.176..529	96,74
11.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Agam	2.249.905.000	2.249.685.540	219.460	99,99
12.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Pasaman	3.177.291.000	3.165.501.089	11.789.911	99,63
13.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Pasaman Barat	2.813.732.000	2.809.913.940	3.818.060	99,86
14.	Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah I	9.793.084.300	9.787.318.600	5.765.700	99,94
15.	Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah II	10.857.289.700	10.851.023.450	6.266.250	99,94
16.	Pengadaan Peralatan dan Bahan Jalan dan Jembatan	6.213.042.000	4.133.563.700	2.079.478.300	66,53

VIII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke Binamargaan

Program peningkatan sarana dan prasarana ke bina margaan ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Laboratorium Ke PU An	340.022.300	337.965.692	2.056.608	99,40

2.	Pengadaan Alat-alat Ukur dan Laboratorium Ke Bina Margaan	1.371.757.275	1.371.569.881	187.394	99,99
3.	Monitoring Pengendalian Mutu UPTD	270.843.890	257.982.155	12.861.735	95,25

IX. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program pengembangan sistem pengelolaan air minum dan air Limbah ini terdiri atas 3(tiga) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Pendampingan Program Sanimas IDB dan PPSP	350.554.500	271.940.209	78.614.291	77,57
2.	Pembinaan Penyusunan Masterplan Sanitasi Kabupaten/Kota	306.386.500	271.181.650	35.204.850	88,51
3.	Penyusunan Profil Pengelolaan Sanitasi Provinsi Sumatera Barat	180.000.000	168.021.000	11.979.000	93,35

X. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Program penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kotaini terdiri atas 21 (dua puluh satu) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat (Lanjutan)	96.469.877.143	89.528.482.055	6.941.395.088	92,80
2.	Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat (Lanjutan)	34.764.471.000	31.089.253.100	3.675.217.900	89,43
3.	Pembangunan Gedung	378.610.000	358.823.110	19.786.890	94,77

	Utama Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat				
4.	Pembangunan Gedung Convention Hall Sumatera Barat (Lanjutan)	10.234.000.000	8.782.841.670	1.451.158.330	85,82
5.	Pembangunan Gedung Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat	993.140.500	978.188.650	19.951.850	98,49
6.	Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat	97.726.000	81.182.186	16.543.814	83,07
7.	Penyelenggaraan Hari Pers Nasional	290.182.700	272.190.730	17.991.970	93,80
8.	Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara	2.053.616.600	1.869.771.250	183.845.350	91,05
9.	Pembangunan Gedung Pengendali Inflasi Provinsi Sumatera Barat	3.498.769.300	3.480.645.920	18.123.380	99,48
10.	Penambahan Garase Rumah Dinas Gubernur	748.110.500	646.880.415	101.230.085	86,47
11.	Pembangunan Taman Wisata Kelok Sembilan	1.161.820.000	172.092.000	989.728.000	14,81
12.	Pendampingan Pembinaan Pengelolaan Rumah Negara di Sumatera Barat	135.526.800	133.700.550	1.826.250	98,65
13.	Penyelenggaraan Layanan Konsultasi Teknis dan Advokasi Serta Tersedianya Data Informasi Teknis Bidang Keciaptakaryaan	214.950.000	165.256.700	49.693.300	76,88
14.	Pembinaan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)	571.970.000	528.383.408	43.586.592	92,38
15.	Assesmen Bangunan Gedung dan Sertifikasi	242.730.000	220.532.622	22.197.378	90,86

	Laik Fungsi Bangunan Gedung				
16.	Rekonstruksi Bangunan Pasca Bencana I	4.232.751.200	4.230.508.000	2.243.200	99,95
17.	Pembangunan Shelter di Musholla Jabal Rahmah di Painan (lanjutan)	252.951.000	227.649.047	25.301.953	90,00
18.	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat	600.000.000	99.000.000	501.000.000	16,50
19.	Pembangunan Lapangan Tenis Gubernur (lanjutan)	250.000.000	238.424.920	11.575.080	95,37
20.	Rekonstruksi Bangunan Pasca Bencana II	20.000.000	17.741.332	2.258.668	88,71
21.	Penyusunan Masterplan Pasar Koto Baru	130.000.000	123.516.920	6.483.080	95,01

XI. Program Bimbingan Teknis Peningkatan Jasa Konstruksi

Program bimbingan teknis peningkatan jasa konstruksi ini terdiri atas 6 (enam) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Penyusunan Ranperda SMM	1.639.500	1.639.500	0,00	100
2.	Bimbingan Teknis/Workshop Jasa Konstruksi	586.501.110	516.822.250	69.678.860	88,12
3.	Lokakarya, Sosialisasi dan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi	387.337.865	317.701.350	69.636.515	82,02
4.	Update Profil Jasa Konstruksi	139.029.140	108.868.000	30.161.140	78,31
5.	Penyusunan Ranperda	171.642.780	138.313.040	33.329.740	80,58

	SMK3				
6.	Sertifikasi Ahli Muda	177.688.570	148.966.225	28.722.345	83,84

XII. Program Perencanaan Tata Ruang

Program pengembangan kinerja penyelenggaraan pusat informasi pengembangan permukiman dan bangunan ini terdiri atas 8 (delapan) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	923.797.750	888.039.910	35.757.379	96,13
2.	Proses Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	522.914.950	485.269.586	37.645.364	92,80
3.	Pelatihan Pemetaan Tata Ruang	377.813.950	316.217.662	61.596.288	83,70
4.	Penyusunan Database ke PU an dan Tata Ruang Provinsi / Kabupaten / Kota	944.666.750	869.794.623	74.872.127	92,07
5.	Legalisasi Perda Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	912.063.150	679.409.120	232.654.030	74,49
6.	Koordinasi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Barat	286.593.950	136.645.396	149.948.554	47,68
7.	Peningkatan Pemahaman Pemangku Kepentingan Terhadap Penataan Ruang	572.282.150	416.885.734	155.396.416	72,85
8.	Penyebarluasan Informasi dan Bahan Komunikasi Penataan Ruang	389.119.860	347.921.100	41.198.760	89,41

XIII. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program program perencanaan tata ruang ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Pengawasan Teknis SPM Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota	167.546.950	117.479.800	50.067.150	70,12
2.	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	144.591.350	111.775.200	32.816.150	77,30
3.	Monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	167.562.950	96.728.700	70.834.250	57,73

XIV. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program program pengendalian pemanfaatan ruang ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi	145.746.900	285.188.972	17.511.783	94,21

XV. Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi

Program program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah ini terdiri atas 4 (empat) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Pembangunan Drainase Lintas Kabupaten/Kota	5.318.000	5.318.000	0,00	100
2.	Survey Drainase Lintas Kabupaten/Kota	177.017.750	172.980.148	4.037.602	97,72

3.	Pembangunan Drainase Kab.Tanah Datar dan Kota Padang Panjang	228.000.000	226.235.000	1.765.000	99,23
4.	Pembangunan Drainase Kab.Solok dan Kota Solok	228.000.000	225.797.000	2.203.000	99,03

XVI. Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kab/Kota

Program program pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi ini terdiri atas 5 (lima) kegiatan yang memiliki yang memiliki pencapaian realisasi keuangan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciaptakaryaan di Provinsi Sumatera Barat	558.915.000	434.462.114	124.452.886	77,73
2.	Pembinaan Kegiatan PAMSIMAS di Provinsi Sumatera Barat	164.300.000	155.550.414	8.749.586	94,67
3.	Penyusunan Rencana Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) Regional di Provinsi Sumatera Barat	610.000.000	597.048.716	12.951.284	97,88
4.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) di Provinsi Sumatera Barat	268.000.000	215.584.350	52.415.650	80,44
5.	Peningkatan Sistem Pelayanan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) Kawasan Palangai – Nyiur Melambai Kab.Pesisir Selatan	1.170.000.000	0,00	1.170.000.000	0,00

4. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

REALISASI PER PROGRAM KEGIATAN APBD

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI		REALISASI			SISA ANGGARAN
			FISIK	KINERJA	KEUANGAN		KINERJA	
					(Rp)	(%)		
	B E L A N J A L A N G S U N G	454.508.912.062,00	97,64	Sangat baik	410.883.552.328,86	90,40	Sangat baik	43.625.359.733,14
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.125.016.140,00	100,00	Sangat baik	4.667.332.355	91,07	Sangat baik	457.683.785
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6.986.908.167,00	100,00	Sangat baik	6.717.495.820	96,14	Sangat baik	269.412.347
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	309.819.200,00	100,00	Sangat baik	299.822.000	96,77	Sangat baik	9.997.200
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	185.148.000,00	100,00	Sangat baik	161.967.795	87,48	Sangat baik	23.180.205
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.369.035.000,00	100,00	Sangat baik	1.258.727.796	91,94	Sangat baik	110.307.204
VI	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI	204.488.943.817,00	91,69	Sangat baik	181.077.032.125	88,55	Sangat baik	23.411.911.692
VII	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	65.298.230.300,00	97,92	Sangat baik	62.760.807.356	96,11	Sangat baik	2.537.422.944
VIII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	1.982.623.465,00	100,00	Sangat baik	1.967.517.728	99,24	Sangat baik	15.105.737
IX	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	836.941.000,00	100,00	Sangat baik	711.142.859	84,97	Sangat baik	125.798.141
X	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.341.202.743,00	92,58	Sangat baik	143.245.064.585	91,04	Sangat baik	14.096.138.158
XI	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	1.463.838.965,00	100,00	Sangat baik	1.232.310.365	84,18	Sangat baik	231.528.600
XII	PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG	4.929.252.510,00	100,00	Sangat baik	4.140.183.131	83,99	Baik	789.069.379
XIII	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	479.701.250,00	100,00	Sangat baik	325.983.700	67,96	Cukup	153.717.550
XIV	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	302.700.755,00	100,00	Sangat baik	285.188.972	94,21	Sangat baik	17.511.783
XV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE KEWENANGAN PROVINSI	638.335.750,00	100,00	Sangat baik	630.330.148	98,75	Sangat baik	8.005.602
XVI	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.771.215.000,00	80,00	Baik	1.402.645.594	50,61	Kurang	1.368.569.406

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI		REALISASI			SISA ANGGARAN	
			FISIK	KINERJA	KEUANGAN		KINERJA		
					(%)	(Rp)			(%)
	BELANJA LANGSUNG	454.508.912.062,00	97,64	Sangat baik	410.883.552.328,86	90,40	Sangat baik	43.625.359.733,14	
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.125.016.140,00	100,00	Sangat baik	4.667.332.355	91,07	Sangat baik	457.683.785	
1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.820.000,00	100,00	Sangat baik	6.752.859	99,02	Sangat baik	67.141	
2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.669.800.000,00	100,00	Sangat baik	1.398.219.945	83,74	Baik	271.580.055	
3	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN, PENGAMANAN DAN SOPIR KANTOR	1.791.555.390,00	100,00	Sangat baik	1.756.903.555	98,07	Sangat baik	34.651.835	
4	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	178.711.000,00	100,00	Sangat baik	178.493.590	99,88	Sangat baik	217.410	
5	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	142.365.750,00	100,00	Sangat baik	125.931.180	88,46	Sangat baik	16.434.570	
6	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.000.000,00	100,00	Sangat baik	26.327.600	87,76	Sangat baik	3.672.400	
7	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	30.000.000,00	100,00	Sangat baik	29.996.000	99,99	Sangat baik	4.000	
8	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH DAN KELUAR DAERAH	950.764.000,00	100,00	Sangat baik	833.237.263	87,64	Sangat baik	117.526.737	
9	PENYEDIAAN JASA INFORMASI, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI	325.000.000,00	100,00	Sangat baik	311.470.363	95,84	Sangat baik	13.529.637	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6.986.908.167,00	100,00	Sangat baik	6.717.495.820	96,14	Sangat baik	269.412.347	
10	PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI	384.991.700,00	100,00	Sangat baik	354.336.700	92,04	Sangat baik	30.655.000	
11	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	1.266.521.316,00	100,00	Sangat baik	1.212.734.700	95,75	Sangat baik	53.786.616	
12	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	409.400.000,00	100,00	Sangat baik	405.030.053	98,93	Sangat baik	4.369.947	
13	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	105.850.000,00	100,00	Sangat baik	81.626.557	77,12	Baik	24.223.443	
14	PENGLOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASET OPD	315.028.000,00	100,00	Sangat baik	243.290.559	77,23	Baik	71.737.441	
15	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.894.201.251,00	100,00	Sangat baik	1.894.201.251	100,00	Sangat baik	0	
16	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.322.961.400,00	100,00	Sangat baik	1.250.857.000	94,55	Sangat baik	72.104.400	
17	PEMBANGUNAN FASILITAS PENUNJANG KANTOR DINAS PU DAN PENATAAN RUANG SUMATERA BARAT	360.000.000,00	100,00	Sangat baik	357.788.000	99,39	Sangat baik	2.212.000	
18	RENOVASI RUMAH DINAS PU DAN PENATAAN RUANG SUMATERA BARAT	927.954.500,00	100,00	Sangat baik	917.631.000	98,89	Sangat baik	10.323.500	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	309.819.200,00	100,00	Sangat baik	299.822.000	96,77	Sangat baik	9.997.200	
19	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	309.819.200,00	100,00	Sangat baik	299.822.000	96,77	Sangat baik	9.997.200	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	185.148.000,00	100,00	Sangat baik	161.967.795	87,48	Sangat baik	23.180.205	
20	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	185.148.000,00	100,00	Sangat baik	161.967.795	87,48	Sangat baik	23.180.205	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.369.035.000,00	100,00	Sangat baik	1.258.727.796	91,94	Sangat baik	110.307.204	
21	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	247.335.000,00	100,00	Sangat baik	215.886.042	87,28	Sangat baik	31.448.958	
22	PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD	791.700.000,00	100,00	Sangat baik	785.450.000	99,21	Sangat baik	6.250.000	

23	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN HTISAR REALISASI KINERJA SKPD	80.000.000,00	100,00	Sangat baik	65.047.991	81,31	Baik	14.952.009
24	MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD	250.000.000,00	100,00	Sangat baik	192.343.763	76,94	Baik	57.656.237
VI	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI	204.488.943.817,00	91,69	Sangat baik	181.077.032.125	88,55	Sangat baik	23.411.911.692
25	PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	919.816.700,00	100,00	Sangat baik	911.343.209	99,08	Sangat baik	8.473.491
26	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KOTA PADANG DAN KAB. PESISIR SELATAN	7.760.310.900,00	100,00	Sangat baik	7.748.750.850	99,85	Sangat baik	11.560.050
27	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK DAN KOTA SOLOK	27.361.349.400,00	100,00	Sangat baik	27.352.454.600	99,97	Sangat baik	8.894.800
28	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. 50 KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH	10.297.251.700,00	100,00	Sangat baik	10.268.177.700	99,72	Sangat baik	29.074.000
29	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT	11.463.198.200,00	100,00	Sangat baik	11.459.817.350	99,97	Sangat baik	3.380.850
30	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA	13.219.999.000,00	100,00	Sangat baik	13.218.918.950	99,99	Sangat baik	1.080.050
31	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. PASAMAN DAN KAB. TANAH DATAR DAN KOTA SAWAHLUNTO	11.742.896.700,00	92,87	Sangat baik	10.557.404.479	89,90	Sangat baik	1.185.492.221
32	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. AGAM DAN KOTA BUKITTINGGI	25.279.632.000,00	100,00	Sangat baik	25.275.414.984	99,98	Sangat baik	4.217.016
33	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. SOLOK DAN KAB. SOLOK SELATAN	10.825.704.800,00	100,00	Sangat baik	10.821.169.800	99,96	Sangat baik	4.535.000
34	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	4.984.423.800,00	100,00	Sangat baik	4.979.475.000	99,90	Sangat baik	4.948.800
35	PEMBANGUNAN JEMBATAN DI PROVINSI WILAYAH-I	9.529.042.800,00	100,00	Sangat baik	9.511.768.500	99,82	Sangat baik	17.274.300
36	PEMBANGUNAN JEMBATAN DI PROVINSI WILAYAH-II	14.127.563.500,00	86,00	Sangat baik	11.191.081.300	79,21	Baik	2.936.482.200
37	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN/JEMBATAN PROVINSI	821.948.650,00	100,00	Sangat baik	777.555.185	94,60	Sangat baik	44.393.465
38	PENGADAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN / JEMBATAN PROVINSI	11.200.000.000,00	35,39	Kurang	3.963.882.728	35,39	Kurang	7.236.117.272
39	PENGADAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN/JEMBATAN DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS	7.886.767.500,00	3,02	Kurang	238.369.312	3,02	Kurang	7.648.398.188
40	MONITORING DAN PENGAWASAN PERIZINAN UTILITAS UMUM	54.618.800,00	100,00	Sangat baik	54.179.458	99,20	Sangat baik	439.342
41	PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI	599.994.800,00	100,00	Sangat baik	593.555.518	98,93	Sangat baik	6.439.282
42	PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN PROVINSI	483.169.000,00	100,00	Sangat baik	480.741.662	99,50	Sangat baik	2.427.338
43	PENYUSUNAN DATABASE DAN SURVEY JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI	1.172.052.667,00	100,00	Sangat baik	925.721.196	78,98	Baik	246.331.471
44	PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI	6.674.484.000,00	100,00	Sangat baik	6.464.473.163	96,85	Sangat baik	210.010.837
45	PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN PROVINSI DAK	22.662.000.000,00	100,00	Sangat baik	18.878.765.861	83,31	Baik	3.783.234.139
46	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. PADANG PARIAMAN DAN KOTA PARIAMAN	5.422.718.900,00	100,00	Sangat baik	5.404.011.320	99,66	Sangat baik	18.707.580
VII	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	65.298.230.300,00	97,92	Sangat baik	62.760.807.356	96,11	Sangat baik	2.537.422.944
47	REHAB / PEMEL. RUTIN JEMBATAN PROVINSI DAN BANGUNAN PELENGKAP JALAN	3.261.727.800,00	100,00	Sangat baik	2.971.851.094	91,11	Sangat baik	289.876.706
48	REHAB / PEMEL. RUTIN JALAN PROVINSI DI KOTA BUKITTINGGI DAN AGAM TIMUR	3.102.564.000,00	100,00	Sangat baik	3.101.701.200	99,97	Sangat baik	862.800

49	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. 50 KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH	4.949.178.500,00	100,00	Sangat baik	4.944.719.190	99,91	Sangat baik	4.459.310
50	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. TANAH DATAR DAN KOTA PADANG PANJANG	3.464.000.000,00	100,00	Sangat baik	3.458.576.410	99,84	Sangat baik	5.423.590
51	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PADANG PARIAMAN DAN KOTA PADANG	2.373.808.000,00	100,00	Sangat baik	2.346.548.100	98,85	Sangat baik	27.259.900
52	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. SOLOK DAN KOTA SOLOK	2.986.084.000,00	100,00	Sangat baik	2.984.141.450	99,93	Sangat baik	1.942.550
53	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB SOLOK SELATAN	2.755.435.000,00	100,00	Sangat baik	2.755.356.160	100,00	Sangat baik	78.840
54	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA	3.074.829.000,00	100,00	Sangat baik	3.074.066.612	99,98	Sangat baik	762.388
55	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PESIR SELATAN DAN KEP. MENTAWAI	3.026.260.000,00	100,00	Sangat baik	2.966.017.350	98,01	Sangat baik	60.242.650
56	PEMELIHARAAN PERALATAN JALAN DAN JEMBATAN	1.200.000.000,00	100,00	Sangat baik	1.160.823.471	96,74	Sangat baik	39.176.529
57	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. AGAM	2.249.905.000,00	100,00	Sangat baik	2.249.685.540	99,99	Sangat baik	219.460
58	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PASAMAN	3.177.291.000,00	100,00	Sangat baik	3.165.501.089	99,63	Sangat baik	11.789.911
59	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PASAMAN BARAT	2.813.732.000,00	100,00	Sangat baik	2.809.913.940	99,86	Sangat baik	3.818.060
60	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WILAYAH I	9.793.084.300,00	100,00	Sangat baik	9.787.318.600	99,94	Sangat baik	5.765.700
61	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WILAYAH II	10.857.289.700,00	100,00	Sangat baik	10.851.023.450	99,94	Sangat baik	6.266.250
62	PENGADAAN PERALATAN DAN BAHAN JALAN DAN JEMBATAN	6.213.042.000,00	66,67	Sangat baik	4.133.563.700	66,53	Cukup	2.079.478.300
VIII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	1.982.623.465,00	100,00	Sangat baik	1.967.517.728	99,24	Sangat baik	15.105.737
63	PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN LABORATORIUM KE BINA MARGAAN	340.022.300,00	100,00	Sangat baik	337.965.692	99,40	Sangat baik	2.056.608
64	PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR DAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN	1.371.757.275,00	100,00	Sangat baik	1.371.569.881	99,99	Sangat baik	187.394
65	MONITORING PENGENDALIAN MUTU UPTD	270.843.890,00	100,00	Sangat baik	257.982.155	95,25	Sangat baik	12.861.735
IX	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	836.941.000,00	100,00	Sangat baik	711.142.859	84,97	Sangat baik	125.798.141
66	PENDAMPINGAN PROGRAM SANIMAS IDB DAN PPSP	350.554.500,00	100,00	Sangat baik	271.940.209	77,57	Baik	78.614.291
67	PEMBINAAN PENYUSUNAN MASTERPLAN SANITASI KAB/KOTA	306.386.500,00	100,00	Sangat baik	271.181.650	88,51	Sangat baik	35.204.850
68	PENYUSUNAN PROFIL PENGELOLAAN SANITASI PROVINSI SUMATERA BARAT	180.000.000,00	100,00	Sangat baik	168.021.000	93,35	Sangat baik	11.979.000
X	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.341.202.743,00	92,58	Sangat baik	143.245.064.585	91,04	Sangat baik	14.096.138.158
69	PEMBANGUNAN STADIUM UTAMA SUMATERA BARAT (LANJUTAN)	96.469.877.143,00	99,11	Sangat baik	89.528.482.055	92,80	Sangat baik	6.941.395.088
70	PEMBANGUNAN GEDUNG KEBUDAYAAN SUMATERA BARAT (LANJUTAN)	34.764.471.000,00	100,00	Sangat baik	31.089.253.100	89,43	Sangat baik	3.675.217.900
71	PEMBANGUNAN GEDUNG UTAMA KANTOR GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT	378.610.000,00	100,00	Sangat baik	358.823.110	94,77	Sangat baik	19.786.890
72	PEMBANGUNAN GEDUNG CONVENTION HALL SUMATERA BARAT (LANJUTAN)	10.234.000.000,00	95,01	Sangat baik	8.782.841.670	85,82	Sangat baik	1.451.158.330
73	PEMBANGUNAN GEDUNG BUNDO KANDUANG PROVINSI SUMATERA BARAT	993.140.500,00	100,00	Sangat baik	978.188.650	98,49	Sangat baik	14.951.850

74	PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN TEKNIS (TPT) BANGUNAN NEGARA DI SUMATERA BARAT	97.726.000,00	100,00	Sangat baik	81.182.186	83,07	Sangat baik	16.543.814
75	PENYELENGGARAAN HARI PERS NASIONAL	290.182.700,00	100,00	Sangat baik	272.190.730	93,80	Sangat baik	17.991.970
76	REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA	2.053.616.600,00	100,00	Sangat baik	1.869.771.250	91,05	Sangat baik	183.845.350
77	PEMBANGUNAN GEDUNG PENGENDALIAN INFLASI PROVINSI SUMATERA BARAT	3.498.769.300,00	100,00	Sangat baik	3.480.645.920	99,48	Sangat baik	18.123.380
78	PENAMBAHAN GARASE RUMAH DINAS GUBERNUR	748.110.500,00	100,00	Sangat baik	646.880.415	86,47	Sangat baik	101.230.085
79	PEMBANGUNAN TAMAN WISATA KELOK SEMBILAN	1.161.820.000,00	-	Kurang	172.092.000	14,81	Kurang	989.728.000
80	PENDAMPINGAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI SUMATERA BARAT	135.526.800,00	100,00	Sangat baik	133.700.550	98,65	Sangat baik	1.826.250
81	PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSULTASI TEKNIS DAN ADVOKASI SERTA TERSEDIAANYA DATA INFORMASI TEKNIS BIDANG KECIPTAKARYAAN	214.950.000,00	100,00	Sangat baik	165.256.700	76,88	Baik	49.693.300
82	PEMBINAAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)	571.970.000,00	100,00	Sangat baik	528.383.408	92,38	Sangat baik	43.586.592
83	ASSESMEN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKASI LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	242.730.000,00	100,00	Sangat baik	220.532.622	90,86	Sangat baik	22.197.378
84	REKONSTRUKSI BANGUNAN PASCA BENCANA I	4.232.751.200,00	100,00	Sangat baik	4.230.508.000	99,95	Sangat baik	2.243.200
85	PEMBANGUNAN SHELTER DI MUSHOLLA JABAL RAHMAH DI PAINAN (LANJUTAN)	252.951.000,00	100,00	Sangat baik	227.649.047	90,00	Sangat baik	25.301.953
86	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT	600.000.000,00	50,00	Kurang	99.000.000	16,50	Kurang	501.000.000
87	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENNIS GUBERNURAN (LANJUTAN)	250.000.000,00	100,00	Sangat baik	238.424.920	95,37	Sangat baik	11.575.080
88	REKONSTRUKSI BANGUNAN PASCA BENCANA II	20.000.000,00	100,00	Sangat baik	17.741.332	88,71	Sangat baik	2.258.668
89	PENYUSUNAN MASTERPLAN PASAR KOTO BARU	130.000.000,00	100,00	Sangat baik	123.516.920	95,01	Sangat baik	6.483.080
XI	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	1.463.838.965,00	100,00	Sangat baik	1.232.310.365	84,18	Sangat baik	231.528.600
90	PENYUSUNAN RANPERDA SMM	1.639.500,00	100,00	Sangat baik	1.639.500	100,00	Sangat baik	-
91	BIMBINGAN TEKNIS / WORKSHOP JASA KONSTRUKSI	586.501.110,00	100,00	Sangat baik	516.822.250	88,12	Sangat baik	69.678.860
92	LOKAKARYA, SOSIALISASI DAN FORUM KOMUNIKASI JASA KONSTRUKSI	387.337.865,00	100,00	Sangat baik	317.701.350	82,02	Baik	69.636.515
93	KEGIATAN UPDATE PROFIL JASA KONSTRUKSI	139.029.140,00	100,00	Sangat baik	108.868.000	78,31	Baik	30.161.140
94	PENYUSUNAN RANPERDA SMK3	171.642.780,00	100,00	Sangat baik	138.313.040	80,58	Baik	33.329.740
95	SERTIFIKASI AHLI MUDA	177.688.570,00	100,00	Sangat baik	148.966.225	83,84	Baik	28.722.345
XII	PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG	4.929.252.510,00	100,00	Sangat baik	4.140.183.131	83,99	Baik	789.069.379
96	PENYUSUNAN RTR KAWASAN STRATEGIS PROVINSI	923.797.750,00	100,00	Sangat baik	888.039.910	96,13	Sangat baik	35.757.840
97	PROSES LEGALISASI RENCANA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)	522.914.950,00	100,00	Sangat baik	485.269.586	92,80	Sangat baik	37.645.364
98	PELATIHAN PEMETAAN TATA RUANG	377.813.950,00	100,00	Sangat baik	316.217.662	83,70	Baik	61.596.288
99	PENYUSUNAN DATABASE KE PU AN DAN TATA RUANG PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	944.666.750,00	100,00	Sangat baik	869.794.623	92,07	Sangat baik	74.872.127
100	LEGALISASI PERDA REVISI RTRW PROVINSI SUMATERA BARAT	912.063.150,00	100,00	Sangat baik	679.409.120	74,49	Baik	232.654.030
101	KOORDINASI PERENCANAAN TATA RUANG, PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT	286.593.950,00	100,00	Sangat baik	136.645.396	47,68	Kurang	149.948.554
102	PENINGKATAN PEMAHAMAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PENATAAN RUANG	572.282.150,00	100,00	Sangat baik	416.885.734	72,85	Cukup	155.396.416
103	PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN BAHAN KOMUNIKASI PENATAAN RUANG	389.119.860,00	100,00	Sangat baik	347.921.100	89,41	Sangat baik	41.198.760

XIII	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	479.701.250,00	100,00	Sangat baik	325.983.700	67,96	Cukup	153.717.550
184	PENGAWASAN TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENATAAN RUANG DI KABUPATEN/KOTA	167.546.950,00	100,00	Sangat baik	117.479.800	70,12	Cukup	50.067.150
185	PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT	144.591.350,00	100,00	Sangat baik	111.775.200	77,30	Cukup	32.816.150
186	MONITORING PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	167.562.950,00	100,00	Sangat baik	96.728.700	57,73	Cukup	70.834.250
XIV	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	302.700.755,00	100,00	Sangat baik	285.188.972	94,21	Sangat baik	17.511.783
187	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI RETRIBUSI	302.700.755,00	100,00	Sangat baik	285.188.972	94,21	Sangat baik	17.511.783
XV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE KEWENANGAN PROVINSI	638.335.750,00	100,00	Sangat baik	630.330.148	98,75	Sangat baik	8.005.602
188	PEMBANGUNAN DRAINASE LINTAS KABUPATEN/KOTA	5.318.000,00	100,00	Sangat baik	5.318.000	100,00	Sangat baik	-
189	SURVEY DRAINASE LINTAS KABUPATEN/KOTA	177.017.750,00	100,00	Sangat baik	172.980.148	97,72	Sangat baik	4.037.602
110	PEMBANGUNAN DRAINASE KABUPATEN TANAH DATAR DAN KOTA PADANG PANJANG	228.000.000,00	100,00	Sangat baik	226.235.000	99,23	Sangat baik	1.765.000
111	PEMBANGUNAN DRAINASE KABUPATEN SOLOK DAN KOTA SOLOK	228.000.000,00	100,00	Sangat baik	225.797.000	99,03	Sangat baik	2.203.000
XVI	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM LINTAS DAERAH KAB/KOTA	2.771.215.000,00	80,00	Baik	1.402.645.594	50,61	Kurang	1.368.569.406
112	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN KECIPTAKARYAAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT	558.915.000,00	100,00	Sangat baik	434.462.114	77,73	Baik	124.452.886
113	PEMBINAAN KEGIATAN PAMSIMAS DI PROVINSI SUMATERA BARAT	164.300.000,00	100,00	Sangat baik	155.550.414	94,67	Sangat baik	8.749.586
114	PENYUSUNAN RENCANA SISTEM PELAYANAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL DI PROV. SUMATERA BARAT	610.000.000,00	100,00	Sangat baik	597.048.716	97,88	Sangat baik	12.951.284
115	PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM (SPAM) DI PROV. SUMATERA BARAT WILAYAH I	268.000.000,00	100,00	Sangat baik	215.584.350	80,44	Baik	52.415.650
116	PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM (SPAM) KAWASAN PALANGAI - NYIUR MELAMBAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	1.170.000.000,00	-	Kurang	-	0,00	Kurang	1.170.000.000

Hasil evaluasi capaian kinerja fisik terhadap 16 (enam belas) program diatas, diketahui bahwa terdapat 15 (lima belas) program yang berkinerja sangat baik dan 1 (satu) program baik dan capaian kinerja keuangan terhadap 16 (enam belas) program diatas, diketahui bahwa terdapat 13 (tiga belas) program berkinerja sangat baik, 1 (satu) program berkinerja baik, 1 (satu) program berkinerja cukup, 1 (satu) program berkinerja kurang.

5. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ditemui adanya permasalahan yang signifikan. Namun ada beberapa kegiatan pada tahun 2018 yang memiliki realisasi pencapaian target dibawah 90 % yaitu sebanyak 43 (empat puluh tiga) kegiatan. Adapun penyebab rendahnya pencapaian target masing – masing kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Penyebab Rendahnya Realisasi
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (83,74%)	Sisa anggaran senilai 16,26 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (88,46 %)	Sisa anggaran senilai 11,54 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (87,76 %)	Sisa anggaran senilai 12,24 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran
4	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah (87,64 %)	Sisa anggaran senilai 12,36 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (77,12 %)	Sisa anggaran senilai 22,88 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran
6	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD (77,23 %)	Sisa anggaran senilai 22,77 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (87,48 %)	Sisa anggaran senilai 12,52 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran
8	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD (87,28 %)	Sisa anggaran senilai 12,72 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran
9	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD (76,94 %)	Sisa anggaran senilai 23,06 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran
10	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (81,31 %)	Sisa anggaran senilai 18,69 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran
11	Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Tanah Datar dan Kota Sawahlunto (89,90 %)	)/Kelalaian kontraktor dalam penyelesaian pekerjaan pasangan batu di lahan masyarakat. Penyelesaian pekerjaan pasangan batu mempengaruhi pekerjaan rigid beton di badan jalan yang merupakan major item di dalam paket ini)/Lambatnya memulai pekerjaan di segmen 1 (dari gerbang PLTU sampai ke Jembatan Siasam) karena menunggu proses pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh pihak Pemko Sawahlunto)/Lalu lintas truk tronton pengangkut batu bara untuk kebutuhan PLTU Ombilin

		dengan tonase berat melebihi 40 ton. Tidak tercapai kesepakatan untuk mengganti dengan truk yang lebih kecil sehingga mempengaruhi metoda dan waktu pelaksanaan pekerjaan rigid beton di badan jalan
12	Pembangunan Jembatan Strategis Wilayah – II (79,21 %)	Jeleknya pengelolaan keuangan proyek yang berdampak terlambatnya pembayaran upah dan leveransir material sehingga mengganggu jalannya pekerjaan Tingginya curah hujan pada periode kontrak (bulan Oktober s/d bulan November) 2018 sehingga kurang optimalnya pencapaian progress di lapangan
13	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan (35,39 %)	1. Lokasi Bungus Teluk Kabung – Mandeh – Tarusan DPA awal belum tercantum 4 tahap Dilakukan perubahan menjadi 4 tahap Proses terakhir penetapan lokasi dan menunggu pembentukan panitia Satgas A dan B oleh Kanwil Pertanahan 2. Lokasi Batusangkar Lokasi Baso – Piladang lambatnya pembuatan alas hak dari masyarakat sehingga terakhir sampai di BPN akhir November 2018 Hasil perbaikan alas hak sampai saat ini belum selesai 3. Lokasi Agam Pemindahan lokasi di DPA perubahan sicincin – malalak (selesai) Manggopoh – padang luar (simpang gudang) peta bidang belum siap dari BPN
14	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis (3,02 %)	Proses yang cukup panjang. Saat ini dalam proses tim appraisal
15	Penyusunan Database dan Survey Jalan dan Jembatan Provinsi (78,98 %)	Kegiatan BMS yang tidak dilaksanakan karena gagal pengadaan konsultan individu
16	Pembangunan Jalan Provinsi DAK (83,31 %)	Pada prinsipnya paket pekerjaan fisik telah terlaksana terhadap sisa anggaran senilai 16,69 % merupakan efisiensi dalam

		pelaksanaan anggaran
17	Pengadaan Peralatan dan Bahan Jalan dan Jembatan (66,53 %)	Proses pengadaan yang sebelumnya direncanakan dengan pengadaan E-catalog dan perencanaan hargapun berdasarkan harga yang tertera pada website LKPP E-catalog harganya adalah sekitar Rp.480.000.000,- namun dikarenakan E-Katalog turun tayang pada bulan juli dan sampai akhir desember tetap belum tayang dan dilakukan pengadaan secara lelang cepat juga tidak diminati dikarenakan harga yang direncanakan bukan harga lelang. Maka pengadaan Roller 3 ton ini tidak bisa dilakukan
18	Pendampingan Program Sanimas IDB dan PPSP (77,57 %)	Perjalanan dinas tidak terserap karena minimnya kendaraan dinas dan BBM tidak terserap karena memakai kendaraan pribadi
19	Pembinaan Penyusunan Masterplan Sanitasi Kabupaten/Kota (88,51 %)	Perjalanan dinas tidak terserap karena minimnya kendaraan dinas dan BBM tidak terserap karena memakai kendaraan pribadi
20	Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat (Lanjutan) (89,43 %)	Selisih pagu dana dari harga terkontrak dan adanya addendum kontrak yang harganya turun
21	Pembangunan Gedung Convention Hall Sumatera Barat (Lanjutan) (85,82 %)	Karena penambahan item / volume pekerjaan, realisasi keuangan mengikuti progress fisik
22	Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat (83,07 %)	Perjalanan dinas tidak terserap karena minimnya kendaraan dinas dan BBM tidak terserap karena memakai kendaraan pribadi
23	Penambahan Garase Rumah Dinas Gubernur (86,47 %)	Terdapat tiang listrik di lokasi pekerjaan yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Proses pemindahan membutuhkan waktu
24	Pembangunan Taman Wisata Kelok Sembilan (14,81 %)	Tidak terlaksananya 2 (dua) pekerjaan karena mengusulkan Balai KSDA anggaran biaya untuk penyusunan rencana pengelolaan dan disain tapak melalui dana di Dinas PUPR untuk dilaksanakan oleh

		Balai KSDA
25	Penyelenggaraan Layanan Konsultasi Teknis dan Advokasi Serta Tersedianya Data Informasi Teknis Bidang Keciaptakarya (76,88 %)	Kegiatan sosialisasi diselenggarakan dari tanggal 26 s/d 28 November 2018 di Bukittinggi. Target/ sasaran sosialisasi adalah para mandor mekanikal elektrikal dan mandor bangunan gedung dari gapensi, Gapensi Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Minimnya kehadiran peserta sebagai akibat dari penyelenggaraan sosialisasi yang bertepatan dengan finalisasi penyelesaian pekerjaan dilapangan
26	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat (16,50 %)	Tidak terlaksananya 1 (satu) pekerjaan karena tidak mencukupi waktu pelaksanaan pekerjaan
27	Rekonstruksi Bangunan Pasca Bencana II (88,71 %)	Sisa anggaran senilai 11,29 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran
28	Bimbingan Teknis/Workshop Jasa Konstruksi (88,12 %)	Terjadinya pergeseran narasumber dari luar daerah ke dalam daerah sehingga tidak diperlukan transportasi dan honor nya sesuai dengan Pergub
29	Lokakarya, Sosialisasi dan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi (82,02 %)	Terjadinya pergeseran narasumber dari luar daerah ke dalam daerah sehingga tidak diperlukan transportasi dan honor nya sesuai dengan Pergub
30	Update Profil Jasa Konstruksi (78,31 %)	Perjalanan dinas luar daerah bias dilaksanakan bila disertai undangan, sementara perjalanan dinas dalam daerah terlalu banyak maka terjadi kelebihan begitu juga dengan BBM nya
31	Penyusunan Ranperda SMK3 (80,58 %)	Masih belum dibutuhkan penggandaan yang lebih banyak karena baru bersifat draft ranperda
32	Sertifikasi Ahli Muda (83,84 %)	Tidak tercapainya target jumlah peserta sertifikasi dari target 60 peserta yang terealisasi 45 peserta Tidak diperlukan perjalanan dinas luar daerah untuk mencari narasumber karena sudah diakomodir oleh asosiasi yang menjadi mitra pendamping

33	Pelatihan Pemetaan Tata Ruang (83,70 %)	Jumlah peserta yang hadir pada pelatihan tidak sesuai dengan daftar undangan yang dikirimkan ke instansi yang bersangkutan
34	Legalisasi Perda Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat (74,49 %)	Efisiensi belanja cetak dokumen Perda karena menunggu persetujuan DPRD dan Gubernur, serta efisiensi pada belanja cetak peta karena menunggu rekomendasi BIG
35	Koordinasi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Barat (47,68 %)	Pelaksanaan kegiatan TKPRD telah dilaksanakan pembahasan Revisi RTRW untuk 5 kabupaten/kota dari 19 kabupaten/kota di provisni sumatera barat. Pembahasan RDTR dilaksanakan hanya 1 RDTR yaitu RDTR kawasan kayu tanam Kab.Padang Pariaman. Dalam kegiatan ini kami hanya menunggu kabupaten/kota yang akan melakukan pembahasan dokumen derive RTRW atau penyusunan dokumen revisi RTRW atau penyusunan dokumen RDTR yang nantinya diberikan rekomendasi gubernur terkait kebenaran isi dokumen. Rekomendasi guberur menjadi salah satu syarat dalam menerbitkan persetujuan substansi oleh Kementerian ATR. Sehingga penyerapan danan sangat tergantung dari kesiapan kabupaten/kota dalam penyusunan dokumken tata ruangnya dan rapat-rapat khusus yang membahas permasalahan penataan ruang lainnya
36	Peningkatan Pemahaman Pemangku Kepentingan Terhadap Penataan Ruang (72,85 %)	Efisiensi belanja cetak buku pedoman perundang-undangan bidang penataan ruang dan cetak peta
37	Penyebarluasan Informasi dan Bahan Komunikasi Penataan Ruang (89,41 %)	Adanya sisa anggaran yang berasal dari sisa tender belanja jasa even organizer acara hari tata ruang sebesar Rp.30.496.000
38	Pengawasan Teknis SPM Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota (70,12 %)	Sisa anggaran merupakan sisa belanja akomodasi
39	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Oleh	Sisa anggaran merupakan efisiensi dalam

	penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat (77,30 %)	penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas dan sisa belanja akomodasi
40	Monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (57,73 %)	Adanya perubahan target pelaksanaan kegiatan dari 3 kali menjadi 2 kali
41	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciaptakarya di Provinsi Sumatera Barat (77,73 %)	Tidak terserapnya dana untuk honor para tenaga ahli/instruktur/narasumber karena kegiatan tidak rutin dilakukan
42	Peningkatan Kinerja Pelayanan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) di Provinsi Sumatera Barat (80,44 %)	Perjalanan dinas tidak terserap karena minimnya kendaraan dinas dan BBM tidak terserap karena memakai kendaraan pribadi
43	Peningkatan Sistem Pelayanan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) Kawasan Palangai – Nyiur Melambai Kab.Pesisir Selatan (0,00 %)	Tidak jadi dilaksanakan karena bukan kewenangan provinsi

No	Jenis Kegiatan	Penyebab Rendahnya Realisasi
1	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik (83,74 %)	Sisa anggaran senilai 16,26 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (88,46 %)	Sisa anggaran senilai 11,54 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (87,76 %)	Sisa anggaran senilai 12,24 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran
4	Rapat–Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah (87,64 %)	Sisa anggaran senilai 12,36 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (77,12 %)	Sisa anggaran senilai 22,88 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran
6	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD (77,23 %)	Sisa anggaran senilai 22,77 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang–Undangan (87,48 %)	Sisa anggaran senilai 12,52 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran

8	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD (87,28 %)	Sisa anggaran senilai 12,72 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran
9	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD (76,94 %)	Sisa anggaran senilai 23,06 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran
10	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (81,31 %)	Sisa anggaran senilai 18,69 merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran
11	Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab.Tanah Datar dan Kota Sawahlunto (89,90 %)	)Kelalaian kontraktor dalam penyelesaian pekerjaan pemasangan batu di lahan masyarakat. Penyelesaian pekerjaan pemasangan batu mempengaruhi pekerjaan rigid beton di badan jalan yang merupakan major item di dalam paket ini)Lambatnya memulai pekerjaan di segmen 1 (dari gerbang PLTU sampai ke Jembatan Siasam) karena menunggu proses pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh pihak Pemko Sawahlunto)Lalu lintas truk tronton pengangkut batu bara untuk kebutuhan PLTU Ombilin dengan tonase berat melebihi 40 ton. Tidak tercapai kesepakatan untuk mengganti dengan truk yang lebih kecil sehingga mempengaruhi metoda dan waktu pelaksanaan pekerjaan rigid beton di badan jalan
12	Pembangunan Jembatan Strategis Wilayah – II (79,21 %)	)Jeleknya pengelolaan keuangan proyek yang berdampak terlambatnya pembayaran upah dan leveransir material sehingga mengganggu jalannya pekerjaan)Tingginya curah hujan pada periode kontrak (bulan Oktober s/d bulan November) 2018 sehingga kurang optimalnya pencapaian progress di lapangan
13	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan (35,39 %)	4. Lokasi Bungus Teluk Kabung – Mandeh – Tarusan)DPA awal belum tercantum 4 tahap)Dilakukan perubahan menjadi 4 tahap

		)Proses terakhir penetapan lokasi dan menunggu pembentukan panitia Satgas A dan B oleh Kanwil Pertanahan 5. Lokasi Batusangkar)Lokasi Baso – Piladang lambatnya pembuatan alas hak dari masyarakat sehingga terakhir sampai di BPN akhir November 2018)Hasil perbaikan alas hak sampai saat ini belum selesai 6. Lokasi Agam)Pemindahan lokasi di DPA perubahan sicincin – malalak (selesai))Manggopoh – padang luar (simpang gudang) peta bidang belum siap dari BPN
14	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis (3,02 %)	Proses yang cukup panjang. Saat ini dalam proses tim appraisal
15	Penyusunan Database dan Survey Jalan dan Jembatan Provinsi (78,98 %)	Kegiatan BMS yang tidak dilaksanakan karena gagal pengadaan konsultan individu
16	Pembangunan Jalan Provinsi DAK (83,31 %)	Pada prinsipnya paket pekerjaan fisik telah terlaksana terhadap sisa anggaran senilai 16,69 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran
17	Pengadaan Peralatan dan Bahan Jalan dan Jembatan (66,53 %)	Proses pengadaan yang sebelumnya direncanakan dengan pengadaan E-catalog dan perencanaan harga pun berdasarkan harga yang tertera pada website LKPP E-catalog harganya adalah sekitar Rp.480.000.000,- namun dikarenakan E-Katalog turun tayang pada bulan juli dan sampai akhir desember tetap belum tayang dan dilakukan pengadaan secara lelang cepat juga tidak diminati dikarenakan harga yang direncanakan bukan harga lelang. Maka pengadaan Roller 3 ton ini tidak bisa dilakukan
18	Pendampingan Program Sanimas IDB dan PPSP (77,57 %)	Perjalanan dinas tidak terserap karena minimnya kendaraan dinas dan BBM tidak terserap karena memakai kendaraan

		pribadi
19	Pembinaan Penyusunan Masterplan Sanitasi Kabupaten/Kota (88,51 %)	Perjalanan dinas tidak terserap karena minimnya kendaraan dinas dan BBM tidak terserap karena memakai kendaraan pribadi
20	Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat (Lanjutan) (89,43 %)	Selisih pagu dana dari harga terkontrak dan adanya addendum kontrak yang harganya turun
21	Pembangunan Gedung Convention Hall Sumatera Barat (Lanjutan) (85,82 %)	Karena penambahan item / volume pekerjaan, realisasi keuangan mengikuti progress fisik
22	Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat (83,07 %)	Perjalanan dinas tidak terserap karena minimnya kendaraan dinas dan BBM tidak terserap karena memakai kendaraan pribadi
23	Penambahan Garase Rumah Dinas Gubernur (86,47 %)	Terdapat tiang listrik di lokasi pekerjaan yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Proses pemindahan membutuhkan waktu
24	Pembangunan Taman Wisata Kelok Sembilan (14,81 %)	Tidak terlaksananya 2 (dua) pekerjaan karena mengusulkan Balai KSDA anggaran biaya untuk penyusunan rencana pengelolaan dan disain tapak melalui dana di Dians PUPR untuk dilaksanakan oleh Balai KSDA
25	Penyelenggaraan Layanan Konsultasi Teknis dan Advokasi Serta Tersedianya Data Informasi Teknis Bidang Keciaptakarya (76,88 %)	Kegiatan sosialisasi diselenggarakan dari tanggal 26 s/d 28 November 2018 di Bukittinggi. Target/ sasaran sosialisasi adalah para mandor mekanikal elektrik dan mandor bangunan gedung dari gapensi, Gapensi Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Minimnya kehadiran peserta sebagai akibat dari penyelenggaraan sosialisasi yang bertepatan dengan finalisasi penyelesaian pekerjaan dilapangan
26	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat (16,50 %)	Tidak terlaksananya 1 (satu) pekerjaan karea tidak mencukupi waktu pelaksanaan pekerjaan
27	Rekonstruksi Bangunan Pasca	Sisa anggaran senilai 11,29 % merupakan

	Bencana II (88,71 %)	efisiensi dalam pelaksanaan anggaran
28	Bimbingan Teknis/Workshop Jasa Konstruksi (88,12 %)	Terjadinya pergeseran narasumber dari luar daerah ke dalam daerah sehingga tidak diperlukan transportasi dan honorinya sesuai dengan Pergub
29	Lokakarya, Sosialisasi dan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi (82,02 %)	Terjadinya pergeseran narasumber dari luar daerah ke dalam daerah sehingga tidak diperlukan transportasi dan honorinya sesuai dengan Pergub
30	Update Profil Jasa Konstruksi (78,31 %)	Perjalanan dinas luar daerah bias dilaksanakan bila disertai undangan, sementara perjalanan dinas dalam daerah terlalu banyak maka terjadi kelebihan begitu juga dengan BBM nya
31	Penyusunan Ranperda SMK3 (80,58 %)	Masih belum dibutuhkan penggandaan yang lebih banyak karena baru bersifat draft ranperda
32	Sertifikasi Ahli Muda (83,84 %)	Tidak tercapainya target jumlah peserta sertifikasi dari target 60 peserta yang terealisasi 45 peserta Tidak diperlukan perjalanan dinas luar daerah untuk mencari narasumber karena sudah diakomodir oleh asosiasi yang menjadi mitra pendamping
33	Pelatihan Pemetaan Tata Ruang (83,70 %)	Jumlah peserta yang hadir pada pelatihan tidak sesuai dengan daftar undangan yang dikirimkan ke instansi yang bersangkutan
34	Legalisasi Perda Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat (74,49 %)	Efisiensi belanja cetak dokumen Perda karena menunggu persetujuan DPRD dan Gubernur, serta efisiensi pada belanja cetak peta karena menunggu rekomendasi BIG
35	Koordinasi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Barat (47,68 %)	Pelaksanaan kegiatan TKPRD telah dilaksanakan pembahasan Revisi RTRW untuk 5 kabupaten/kota dari 19 kabupaten/kota di provinsi sumatera barat. Pembahasan RDTR dilaksanakan hanya 1 RDTR yaitu RDTR kawasan kayu tanam Kab.Padang Pariaman. Dalam kegiatan ini kami hanya menunggu

		kabupaten/kota yang akan melakukan pembahasan dokumen derive RTRW atau penyusunan dokumen revisi RTRW atau penyusunan dokumen RDTR yang nantinya diberikan rekomendasi gubernur terkait kebenaran isi dokumen. Rekomendasi gubernur menjadi salah satu syarat dalam menerbitkan persetujuan substansi oleh Kementerian ATR. Sehingga penyerapan danan sangat tergantung dari kesiapan kabupaten/kota dalam penyusunan dokumken tata ruangnya dan rapat-rapat khusus yang membahas permasalahan penataan ruang lainnya
36	Peningkatan Pemahaman Pemangku Kepentingan Terhadap Penataan Ruang (72,85 %)	Efisiensi belanja cetak buku pedoman perundang-undangan bidang penataan ruang dan cetak peta
37	Penyebarluasan Informasi dan Bahan Komunikasi Penataan Ruang (89,41 %)	Adanya sisa anggaran yang berasal dari sisa tender belanja jasa even organizer acara hari tata ruang sebesar Rp.30.496.000
38	Pengawasan Teknis SPM Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota (70,12 %)	Sisa anggaran merupakan sisa belanja akomodasi
39	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat (77,30 %)	Sisa anggaran merupakan efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas dan sisa belanja akomodasi
40	Monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (57,73 %)	Adanya perubahan target pelaksanaan kegiatan dari 3 kali menjadi 2 kali
41	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciaptakarya di Provinsi Sumatera Barat (77,73 %)	Tidak terserapnya dana untuk honor para tenaga ahli/instruktur/narasumber karena kegiatan tidak rutin dilakukan
42	Peningkatan Kinerja Pelayanan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) di Provinsi Sumatera Barat (80,44 %)	Perjalanan dinas tidak terserap karena minimnya kendaraan dinas dan BBM tidak terserap karena memakai kendaraan pribadi
43	Peningkatan Sistem Pelayanan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) Kawasan	Tidak jadi dilaksanakan karena bukan kewenangan provinsi

	Palangai – Nyiur Melambai Kab.Pesisir Selatan (0,00 %)	
--	--	--

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran

Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas Meningkatkan keandalan system Jaringan jalan untuk meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas layanan jalan nasional.

2. Pencapaian

Pencapaian kinerja Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 ini cukup baik dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, hal ini bisa dilihat pada capaian dengan dana DIPA 9.341.474.000,- realisasi fisik 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 9.091.976.000,- (97,33 %) pada tahun ini dengan rincian :

- Jumlah Pemeliharaan Rutin Jalan pada awal tahun 2018 ditargetkan 95,7 Km terealisasi fisik sebesar 100 %.
- Jumlah Pemeliharaan Rutin Jembatan tahun 2018 ditargetkan 969,7 M' terealisasi fisik sebesar 100 %.
- Jumlah Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan tahun 2018 ditargetkan 597,5 M' terealisasi fisik sebesar 100 %.

3. Kinerja Keuangan

Jumlah anggaran Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 ini adalah sebesar Rp 9.341.474.000,-

4. Manajemen

Pemilihan SDM Satker dan PPK.

Kinerja satu unit organisasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan tersediaan sumber daya manusia yang cukup, cakap dan handal, sampai dengan tahun 2018 masih terdapat kegiatan dari tugas pokok dan fungsi dari Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat yang belum berjalan dengan optimal. Upaya untuk meningkatkan agar pelaksanaan tugas dari organisasi dapat diselenggarakan lebih optimal telah dilaksanakan antara lain dengan menyamakan visi dan misi, meningkatkan rasa kebersamaan kepada seluruh pegawai, serta mengupayakan budaya kerja yang lebih berorientasi pada produk.

Bersamaan dengan adanya perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga yang diturunkan berdasarkan pendekatan kompetensi dan dilanjutkan dengan rotasi dan

promosi pegawai ke pusat maupun antar provinsi maka terjadi rotasi pada eselon II, III, dan IV serta kepala Satker dan PPK di lingkungan Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III, dan diharapkan rotasi dan promosi dimaksud ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi, menyelesaikan permasalahan yang ada, dan tantangan pekerjaan pada tahun-tahun mendatang.

5. Keterbatasan Pendanaan

Terbatasnya alokasi anggaran yang signifikan dibandingkan kebutuhan yang telah diusulkan sebelumnya tentunya akan mengakibatkan beberapa permasalahan yang harus dihadapi dan kendala pencapaian sasaran yang ditetapkan.

6. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

Kekurangan fasilitas kantor (jaringan internet, pc laptop, dan printer)

Mendapat penanganan ruas jalan yang belum bebas (Pelebaran Jalan)

Tidak tersedianya waktu yang cukup untuk masa transisi dan penguasaan tugas baru, sehingga mengakibatkan semua jajaran harus bekerja dengan kecepatan tinggi.

7. Beberapa langkah antisipatif yang akan dilakukan agar kendala yang terjadi di tahun ini tidak terulang di tahun yang akan datang, sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan menentukan prioritas kinerja yang akurat dan handal;

Mengupayakan adanya keseragaman persepsi dalam mendefinisikan indikator kinerja output untuk paket pekerjaan non-fisik, sehingga dapat terukur dengan jelas dan terjaga akuntabilitasnya;

Meningkatkan kompetensi petugas pelaporan dengan memberikan alih pengetahuan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan kebijakan/peraturan pemerintah yang baru secara bertahap dan tetap menjaga pencapaian target sesuai rencana dan kualitas.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri PU No. 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam Pasal 84 menjelaskan bahwa Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumbarmempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan nasional.

1. Kegiatan, sebagaimana dicantumkan dalam Satker Dinas Prasarana Jalan Sumbar bahwa kegiatan merupakan basis satuan kinerja yang terkecil dari kegiatan pokok, sasaran maupun

program dimana kinerja yang direncanakan harus disesuaikan dengan tingkat pencapaian dari suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja dapat dilihat dan diukur melalui indikator outcome yaitu capaian sasaran dan indikator output yaitu capaian kinerja kegiatan,serta merupakan dasar pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga dalam penelenggaraan Infrastruktur bidang jalan dan Jembatan.

Sasaran yang dicapai adalah **Mantapnya Jalan Nasional** dengan realisasi peroutput sebagai berikut:

Tabel Kriteria Penilaian

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	KATEGORI WARNA
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	
2	A	>80 – 90	Memuaskan	
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik	
4	B	>60 – 70	Baik, perlu sedikit perbaikan	
5	CC	>50 – 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar	
6	C	>30 – 50	Kurang, perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar	
7	D	0 – 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar	

EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

Untuk tercapai efektifitas dan efesiensi seluruh kegiatan pada Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat keandalan pelaporan keuangan,pengamanan aset,dan ketaatan Satker antara lain:

- Penegakan integritas dan nilai etika
- Komitmen terhadap kompetensi
- Kepemimpinan yang kondusif
- Pembentukan struktur organisai sesuai dengan kebutuhan

- e. Pendegalisasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. Hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait

LAMPIRAN : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH

DATA PENDUKUNG ELEMEN DATA IKK PROVINSI

LAMPIRAN I.2 PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM (DATA ISIAN PER SKPD)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2018

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah	4 program	yang ada pada lampiran LPPD	FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukkan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Masing-masing SKPD
		Jumlah program nasional (RKP)	4 program		Given	
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah SOP	45 buah			Masing-masing SKPD
		SOP	Buah	Teknis	FC halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan tahapan-tahapan Prosedur, dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya SOP tsb	
		SOP SEKRETARIAT	17	Teknis		
		SOP BINA MARGA	14	Teknis		
		SOP CIPTA KARYA	3	Teknis		
		SOP TATA RUANG	4	Teknis		
		SOP UPTD BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI	3	Teknis		
		SOP UPTD PIP2B	4	Teknis		
3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		Photocopy halaman muka (cover), halaman kedua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tsb	Masing-masing SKPD

		Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda		Daftar rincian yang menunjukkan Permen yang diterbitkan Kementerian teknis yang mengatur urusan yang ditangani	
4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada	27 Jabatan		Daftar rincian yang menunjukkan pejabat struktural yang menangani urusan terkait	Masing-masing SKPD
		Jumlah jabatan yang harus ada	28 Jabatan		FC Struktur organisasi dari SKPD khususnya bidang yang menangani urusan terkait	
5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan		Daftar rincian yang menunjukkan jabatan fungsional yang ada di SKPD pada bidang yang menangani urusan terkait	Masing-masing SKPD
		1. Jabatan Fungsional #1				
		2. Jabatan Fungsional #2				
		3. Jabatan Fungsional #3				
		4. Jabatan Fungsional #4				
6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	368 orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah PNS SKPD pada bidang terkait	Masing-masing SKPD
		Jumlah PNS Provinsi	orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah PNS Provinsi dari BKD	BKD
7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	7 orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan diklatpim	Masing-masing SKPD
		Jumlah pejabat SKPD yang ada	20 orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat SKPD yang ada pada urusan terkait	
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	27 orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan diklatpim	Masing-masing SKPD
		Jumlah pejabat SKPD yang ada	27 orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat SKPD yang ada pada urusan terkait	
9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen			Masing-masing SKPD

	-RENSTRA-SKPD	-RENSTRA-SKPD	ada		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya renstra tsb	
	-RENJA-SKPD	-RENJA-SKPD	ada		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya renja tsb	
	-RKA-SKPD	-RKA-SKPD	ada		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya RKA tsb	
10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	16 program		Photocopy halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program dari skpd pada urusan terkait	Masing-masing SKPD
		Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	16 program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait	
11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	16 program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada renja yang diakomodir dalam RKA	Masing-masing SKPD
		Jumlah Program dalam RKA SKPD	16 program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam RKA	
12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	16 program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada pada RKA dan diakomodir dalam DPA	Masing-masing SKPD
		Jumlah program dalam DPA SKPD	16 program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam DPA	
13	Anggaran SKPD terhadap total anggaran belanja APBD	Total anggaran SKPD	483.181.721.020,10		FC Laporan Keuangan SKPD	Masing-masing SKPD
		Total anggaran belanja APBD	Rp			
14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Realisasi Belanja Modal SKPD	360.761.570.207,86			Masing-masing SKPD
		Realisasi Belanja SKPD	439.313.117.107,86			

15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD	29.943.722.866,00			Masing-masing SKPD
		Realisasi Belanja Barang dan Jasa SKPD	50.121.982.295,00			
16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD	29.943.722.866,00			Masing-masing SKPD
		Realisasi Belanja SKPD	439.313.117.107,86			
17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	Jumlah komponen laporan keuangan	5 komponen			Masing-masing SKPD
	- Neraca	- Neraca	ada		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan neraca tsb	
	- LRA	- LRA	ada		FC halaman muka dan halaman yang menunjukkan LRA	
	- CALK	- CALK	ada		FC halaman muka dan satu atau dua halaman yang menunjukkan CALK	
18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada		FC berita acara pelaksanaan inventarisasi Asset Tetap (2013-2018)	Masing-masing SKPD dan Biro Aset
19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD			Daftar rincian yang menunjukkan jumlah aset yang tidak digunakan atau digunakan oleh pihak lain	Masing-masing SKPD/Hasil Temuan BPK
		Total Asset yang dikuasai SKPD	2.335.009.003.268,12		Daftar rincian yang menunjukkan total aset yang dikuasai SKPD	
20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah			Masing-Masing SKPD
	1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	ada		Foto	
	2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan	tidak ada		Foto	
	3. Leaflet	3. Leaflet	ada		FC Leaflet	
	4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	ada		Daftar Inventaris	
	5. Pengumuman di media massa	5. Pengumuman di media massa	ada		Foto	

21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	tidak ada		FC surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada urusan terkait, dan FC Cover Hasil Survey	Masing-Masing SKPD/tingkat Pemda
----	---------------------------------------	--	-----------	--	--	----------------------------------

DATA PENDUKUNG ELEMEN DATA IKK PROVINSI

LAMPIRAN I.3 (PELAKSANA KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB DAN PILIHAN)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2018

NO	IKK	ELEMEN DATA	ELEMEN DATA PADA LPPD	SATUAN	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
Urusan Pemerintahan Wajib						SKPD
1.	Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik	Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik	1.099,033 Km	72,058%	FC Dokumen yang menunjukkan panjang jalan provinsi dalam kondisi baik (Laporan Kondisi Jalan)	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Panjang seluruh jalan provinsi	1.525,200 Km		FC Dokumen yang menunjukkan panjang seluruh jalan Provinsi	
2.	Rumah Tangga ber Sanitasi	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota	75,19%	75,19%	Agregasi	Dinas Perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	19 Kab/Kota		Agregasi	
3.	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota	76,04%	76,04%	Agregasi	Dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	19 Kab/Kota		Agregasi	

BAB V

PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 merupakan cerminan capaian target kinerja dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis pada tahun selanjutnya. LPPD disusun berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan terhadap Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan sebelumnya. LKPJ ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan 16 (enam belas) program, meliputi: 11 (sebelas) program utama dan 5 (lima) program pendukung. Pada masing-masing program terdiri dari beberapa kegiatan.

Penilaian kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan berdasarkan realisasi fisik maupun keuangannya. Pada laporan ini, dilakukan pengukuran capaian kinerja secara kuantitatif dan dilanjutkan dengan analisis penilaian kinerja secara kuantitatif dengan terlebih dahulu menetapkan kriteria skala kualitatif sehingga dapat diketahui kinerja program/kegiatan secara kualitatif.

Pada tahun anggaran 2018 terdapat (dua) sasaran strategis Dinas yang seluruhnya dapat diukur berdasarkan target indikator kinerjanya masing-masing. Pada umumnya target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja sebelumnya dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada pada masing-masing program.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Total penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2018 ini adalah sebesar 90,92% (Rp. 439.317.857.318,86,-) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 483.181.721.020,10,-.
2. Dari 16 (enam belas) program yang ada pada tahun 2018, capaian kinerja fisik pekerjaan terlaksana dengan kinerja sangat baik sebanyak 15 (lima belas) program dan 1 (satu) program berkinerja baik.

Kualitas pencapaian kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat terhadap program-program tahun 2018 yaitu: capaian kinerja keuangan terhadap 16 (enam belas) program diatas, diketahui bahwa terdapat 13 (tiga belas) program berkinerja sangat baik, 1 (satu) program berkinerja baik, 1 (satu) program berkinerja cukup, 1 (satu) program berkinerja kurang.

3. Penilaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 ini menjadi salah satu bahan untuk pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi sesuai Penetapan Kinerja yang ada.
4. Kendala-kendala yang dihadapi pada tahun 2018 dapat dijadikan cermin untukantisipasi pada tahun-tahun berikutnya.

Padang, Januari 2019
Kepala Dinas

Ir. Fathol Bari, M.Sc.Eng
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640515 199003 1 010

KEGIATAN FISIK TAHUN 2018

**Pembangunan Gedung
Convention Hall**



**Pembangunan Gedung Pemberdayaan
Wanita dan KB**



**Pembangunan Gedung
Kebudayaan**



**PENINGKATAN JALAN ABAI SANGIR - SEI.
DAREH (P.056.3) KAB. DHARMASRAYA**



**PAKET PEMBANGUNAN JALAN TAPUS –
MUARA SEI. LOLO – GELUGUR (P.101) KAB.
PASAMAN**



**PAKET PEMBANGUNAN JALAN TAPUS –
MUARA SEI. LOLO – GELUGUR (P.101) KAB.
PASAMAN**



**PAKET PENINGKATAN JALAN MATUR-
PALEMBAYAN (P.080)**



DATA PENDUKUNG ELEMEN DATA IKK PROVINSI
LAMPIRAN I.2 PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM (DATA ISIAN PER SKPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2018

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah	4 program	yang ada pada lampiran LPPD	FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukkan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Masing-masing SKPD
		Jumlah program nasional (RKP)	4 program		<i>Given</i>	
2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	Jumlah SOP	45 buah			Masing-masing SKPD
		SOP	Buah	Teknis	FC halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan tahapan-tahapan Prosedur, dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya SOP tsb	
		SOP SEKRETARIAT	17	Teknis		
		SOP BINA MARGA	14	Teknis		
		SOP CIPTA KARYA	3	Teknis		
		SOP TATA RUANG	4	Teknis		
		SOP UPTD BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI	3	Teknis		
		SOP UPTD PIP2B	4	Teknis		
3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		Photocopy halaman muka (cover), halaman kedua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tsb	Masing-masing SKPD
		Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda		Daftar rincian yang menunjukkan Permen yang diterbitkan Kementerian teknis yang mengatur urusan yang ditangani	
4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada	27 Jabatan		Daftar rincian yang menunjukkan pejabat struktural yang menangani urusan terkait	Masing-masing SKPD
		Jumlah jabatan yang harus ada	28 Jabatan		FC Struktur organisasi dari SKPD khususnya bidang yang menangani urusan terkait	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan		Daftar rincian yang menunjukkan jabatan fungsional yang ada di SKPD pada bidang yang menangani urusan terkait	Masing-masing SKPD
		1. Jabatan Fungsional #1				
		2. Jabatan Fungsional #2				
		3. Jabatan Fungsional #3				
		4. Jabatan Fungsional #4				
6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	368 orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah PNS SKPD pada bidang terkait	Masing-masing SKPD
		Jumlah PNS Provinsi	orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah PNS Provinsi dari BKD	BKD
7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	7 orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan diklatpim	Masing-masing SKPD
		Jumlah pejabat SKPD yang ada	20 orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat SKPD yang ada pada urusan terkait	
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	27 orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan diklatpim	Masing-masing SKPD
		Jumlah pejabat SKPD yang ada	27 orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat SKPD yang ada pada urusan terkait	
9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen			Masing-masing SKPD
	-RENSTRA-SKPD	-RENSTRA-SKPD	ada		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya renstra tsb	
	-RENJA-SKPD	-RENJA-SKPD	ada		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya renja tsb	
	-RKA-SKPD	-RKA-SKPD	ada		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya RKA tsb	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	16 program		Photocopy halaman muka (cover), halam yang menunjukan program dari skpd pada urusan terkait	Masing-masing SKPD
		Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	16 program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukan program dari SKPD pada urusan terkait	
11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	16 program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada renja yang diakomodir dalam RKA	Masing-masing SKPD
		Jumlah Program dalam RKA SKPD	16 program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam RKA	
12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	16 program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada pada RKA dan diakomodir dalam DPA	Masing-masing SKPD
		Jumlah program dalam DPA SKPD	16 program		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam DPA	
13	Anggaran SKPD terhadap total anggaran belanja APBD	Total anggaran SKPD	483.181.721.020,10		FC Laporan Keuangan SKPD	Masing-masing SKPD
		Total anggaran belanja APBD	Rp			
14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Realisasi Belanja Modal SKPD	360.761.570.207,86			Masing-masing SKPD
		Realisasi Belanja SKPD	439.313.117.107,86			
15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD	29.943.722.866,00			Masing-masing SKPD
		Realisasi Belanja Barang dan Jasa SKPD	50.121.982.295,00			
16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD	29.943.722.866,00			Masing-masing SKPD
		Realisasi Belanja SKPD	439.313.117.107,86			
17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	Jumlah komponen laporan keuangan	5 komponen			Masing-masing
	- Neraca	- Neraca	ada		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukan neraca tsb	

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
	- LRA	- LRA	ada		FC halaman muka dan halaman yang menunjukkan LRA	SKPD
	- CALK	- CALK	ada		FC halaman muka dan satu atau dua halaman yang menunjukkan CALK	
18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada		FC berita acara pelaksanaan inventarisasi Asset Tetap (2013-2018)	Masing-masing SKPD dan Biro Aset
19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD			Daftar rincian yang menunjukkan jumlah aset yang tidak digunakan atau digunakan oleh pihak lain	Masing-masing SKPD/Hasil Temuan BPK
		Total Asset yang dikuasai SKPD	2.335.009.003.268,12		Daftar rincian yang menunjukkan total aset yang dikuasai SKPD	
20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah			Masing-Masing SKPD
	1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	ada		Foto	
	2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan	tidak ada		Foto	
	3. Leaflet	3. Leaflet	ada		FC Leaflet	
	4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	ada		Daftar Inventaris	
	5. Pengumuman di media massa	5. Pengumuman di media massa	ada		Foto	
21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	tidak ada		FC surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada urusan terkait, dan FC Cover Hasil Survey	Masing-Masing SKPD/tingkat Pemda

DATA PENDUKUNG ELEMEN DATA IKK PROVINSI
LAMPIRAN I.3 (PELAKSANA KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB DAN PILIHAN)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2018

NO	IKK	ELEMEN DATA	ELEMEN DATA PADA LPPD	SATUAN	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
Urusan Pemerintahan Wajib						SKPD
1.	Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik	Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik	1.099,033 Km	72,058%	FC Dokumen yang menunjukan panjang jalan provinsi dalam kondisi baik (Laporan Kondisi Jalan)	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Panjang seluruh jalan provinsi	1.525,200 Km		FC Dokumen yang menunjukan panjang seluruh jalan Provinsi	
2.	Rumah Tangga ber Sanitasi	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota	75,19%	75,19%	Agregasi	Dinas Perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	19 Kab/Kota		Agregasi	
3.	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota	76,04%	76,04%	Agregasi	Dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
		Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	19 Kab/Kota		Agregasi	